

Ringkasan Eksekutif  
**Laporan Tahunan 2022**



**Mahkamah Agung  
Republik Indonesia**



**Integritas Tangguh,  
Kepercayaan Publik Tumbuh**







**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ringkasan Eksekutif  
**LAPORAN TAHUNAN 2022**

**Integritas Tangguh,**  
Kepercayaan Publik Tumbuh



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.  
Ketua Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial



**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial



**Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**  
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI



**Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**  
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI



**Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI



**I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Yulius, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

# Daftar Isi

## 07 Penjelasan Tema

## 08 Manajemen Perkara

08 PROGRAM PEMBARUAN

15 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

22 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

24 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

25 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

26 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

26 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

27 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

## 30 Reformasi Birokrasi dan akses terhadap keadilan

30 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

36 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

## 42 Manajemen Sumber Daya Manusia

42 PROGRAM PEMBARUAN

44 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

48 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

52 PROMOSI DAN MUTASI

54 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

## 55 Manajemen Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi

55 PROGRAM PEMBARUAN

56 MANAJEMEN KEUANGAN

63 MANAJEMEN ASET

70 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

71 RENCANA KE DEPAN

## 73 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Dan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)

73 PROGRAM PEMBARUAN

74 PROGRAM PENELITIAN/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

74 KONTRIBUSI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN

75 PUBLIKASI

76 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

## 82 Pengawasan

82 PROGRAM PEMBARUAN

82 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

## 94 PERAN SERTA DAN KERJASAMA

94 KERJA SAMA MULTILATERAL

95 KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

97 KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

99 REFORMASI TERKAIT KEMUDAHAN BERUSAHA

99 PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL





# Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh



Setelah hampir tiga tahun berjuang melawan pandemi Covid-19, tahun 2022 Mahkamah Agung menjadi titik balik bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan di segala bidang, khususnya mengangkat penguatan integritas aparatur. Ibarat pohon, integritas laksana akar yang menancap kuat ke dalam tanah, sekaligus menjadi fondasi bagi tumbuhnya batang, ranting, dan daun. Hal itu mengandung makna bahwa integritas menjadi saka guru dalam menopang kemandirian lembaga peradilan dan memiliki andil besar bagi tumbuhnya kepercayaan publik.

Setiap kejadian yang menimpa selalu memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga, karena kesuksesan lahir dari berbagai kesulitan dan setiap kesulitan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Prahara yang datang secara bertubi-tubi di tahun 2022, menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung dalam upaya menuntaskan agenda reformasi peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Berbagai langkah telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.



# Manajemen Perkara

## PROGRAM PEMBARUAN

Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kesinambungan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Hasil yang diraih digunakan untuk menyempurnakan capaian pembaruan di bidang lainnya sehingga semakin mempertegas wajah peradilan Indonesia yang agung.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

## PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum

dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### 1. Pengaturan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi pada perlindungan korban sehingga setiap korban tindak pidana tertentu, selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Teknis penyelesaian permohonan hak tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi.
- c. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada ketua/ kepala pengadilan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan/atau mahkamah syar'iyah.
- d. Prosedur pengajuan kompensasi sama dengan pengajuan restitusi, kecuali beberapa hal yang diatur dalam Pasal 18 Perma 1 Tahun 2022, antara lain permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa belum atau tidak diketahui.
- e. Pemohon dapat menggabungkan pengajuan permohonan kompensasi secara bersamaan dengan pengajuan permohonan restitusi. Permohonan tersebut wajib diajukan melalui LPSK dan diajukan sebelum atau dalam tahap persidangan terhadap pelaku tindak pidana.

## **2. Pengaturan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang atau perusahaan menjadi milik negara ataupun

untuk dimusnahkan. Dalam hal barang yang dirampas tersebut merupakan milik pihak ketiga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan aset tersebut, tetapi aturannya tidak terperinci. Oleh karena itu, untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Keberatan harus diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik ataupun secara konvensional kepada pengadilan yang berwenang oleh pihak ketiga yang beriktikad baik.
- b. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama.
- c. Pihak ketiga yang beriktikad baik yang dapat mengajukan permohonan adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- d. Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada perkara pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, baik sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
- e. Upaya hukum terhadap penetapan pengadilan adalah kasasi yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon dan/atau turut termohon dan tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali.

## **3. Penyempurnaan Aturan Mediasi Elektronik di Pengadilan**

Norma yang mengatur mediasi elektronik dalam Perma

Nomor 1 Tahun 2016 belum terperinci, hanya dimuat dalam dua pasal, yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Aturan tersebut belum mengakomodasi kebutuhan perkembangan teknologi informasi dan kemungkinan terjadinya kondisi tertentu seperti pandemi. Mahkamah Agung merespons keadaan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut menjadi norma pelengkap bagi Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Beberapa materi muatan penting yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.
- b. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya.
- c. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator.
- d. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik.
- e. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan bersemuka (tatap muka) sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak.
- f. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Penandatanganan kesepakatan perdamaian juga menggunakan tanda tangan elektronik.

#### **4. Pengaturan Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi/Peninjauan Kembali secara Elektronik**

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Perma tersebut melengkapi ekosistem layanan pengadilan elektronik yang telah digulirkan sejak 2018.

Beberapa aspek penting materi muatan Perma Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Permohonan kasasi dan peninjauan kembali harus diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pada sistem informasi pengadilan. Pemohon upaya hukum yang bukan pengguna SIP (nonpengguna SIP) dapat menyatakan kasasi/peninjauan kembali secara lisan dengan mendatangi pengadilan pengaju.
- b. Berkas perkara permohonan kasasi/peninjauan kembali (bundel A dan B) dikirim ke Mahkamah Agung dalam bentuk elektronik. Pengadilan pengaju tidak perlu mengirimkan bundel A dan bundel B cetak. Semua berkas upaya hukum yang disampaikan oleh nonpengguna SIP dilakukan digitalisasi oleh petugas pengadilan dan diunggah ke dalam SIP. Sebelum mengirimkan berkas perkara elektronik, panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dokumen dan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.
- c. Pemberitahuan proses upaya hukum kepada pihak yang telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki domisili elektronik dikirimkan secara elektronik, sedangkan pemberitahuan bagi pihak nonpengguna SIP dilakukan secara langsung.
- d. Pengambilan sumpah penemuan bukti baru dalam peninjauan kembali yang diajukan, dengan alasan adanya surat bukti baru, dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan pemohon peninjauan kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Panitera pengadilan pengaju bertanggung jawab untuk menuangkan berita acara pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik dan mengunggah ke dalam SIP.

## 5. Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan petunjuk teknis berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

Perubahan materi muatan Perma Nomor 7 Tahun 2022 mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas. Beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma ini adalah sebagai berikut.

- a. Persidangan secara elektronik dilaksanakan untuk semua perkara yang didaftarkan secara elektronik. Norma ini mengubah syarat adanya persetujuan pihak penggugat dan tergugat untuk pelaksanaan persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2019. Persidangan elektronik dapat diselenggarakan meskipun tergugat tidak menyetujuinya. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek. Persetujuan tergugat bahkan sama sekali tidak diperlukan untuk perkara TUN dan perkara keberatan atas putusan KPPU.
- b. Perluasan keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus, antara lain, adalah keberatan terhadap putusan KPPU) dan perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- c. Perluasan konsep domisili elektronik sehingga para pihak dapat memilih domisili elektronik berupa surat elektronik (pos-el) atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.
- d. Perluasan pengguna terdaftar layanan pengadilan elektronik menjadi bukan hanya advokat melainkan kurator atau pengurus. Perluasan pengguna

layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik, di antaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

- e. Layanan administrasi perkara secara elektronik mengakomodasi pendaftaran perkara secara prodeo. Norma ini merupakan pembaruan dari konsep *e-payment* pada layanan *e-court* berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang mensyaratkan pembayaran panjar perkara terlebih dahulu untuk mendaftarkan perkara secara elektronik. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan akses pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendaftarkan perkara dan bersidang secara elektronik sehingga meringankan beban tambahan alokasi biaya untuk mendatangi gedung pengadilan.
- f. Pemanggilan tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana tergugat pengguna sistem informasi dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya. Pemanggilan/pemberitahuan tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik disampaikan melalui surat tercatat. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui. Akan tetapi, para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur jalur diplomatik.

## 6. Penyempurnaan Aturan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodasi proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dan pengadilan, yaitu “e-Berpadu”. Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi.

Beberapa pembaruan teknis dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Perluasan Cakupan Administrasi Perkara secara Elektronik hingga meliputi pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, dan pemindahan tempat sidang di pengadilan lain. Perluasan cakupan juga menyangkut perkara dapat ditangani secara elektronik, yaitu praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, dan permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Seluruh Administrasi Perkara Pidana Dilaksanakan secara Elektronik, di mana seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui SIP. Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu, yaitu keadaan yang tidak memungkinkan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan lain yang menurut hakim/majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.
- c. Penerapan Mekanisme Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya dalam Penanganan Perkara Pidana secara Elektronik

- d. Pengadilan dapat Meninggalkan Pencatatan Register dan Buku Kas Keuangan Manual. Perma Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan informasi perkara yang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan norma tersebut, pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan buku register dan buku kas keuangan perkara secara elektronik dalam SIP dapat meninggalkan catatan manual berdasarkan penetapan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing.

#### **7. Penyiapan Aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Mahkamah Agung berinisiatif melakukan upaya pembaruan, penguatan peraturan dan kebijakan, serta kelembagaan sistem eksekusi putusan perdata. Hal tersebut dipercayakan kepada Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 05/KMA/SK/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

#### **8. Penyiapan Aturan tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan**

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan berwenang untuk menerima mendaftarkan, pengakuan, pelaksanaan secara paksa (eksekusi) dan/atau pembatalan putusan arbitrase. Untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum atas pelaksanaan kewenangan pengadilan tersebut, diperlukan kajian, penelitian, pengembangan peraturan, peningkatan kapasitas hakim dan aparat pengadilan, serta pemantauan dan evaluasi. Mahkamah Agung telah membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Kelompok Kerja Arbitrase Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## 9. Penyiapan Aturan tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku tetapi berorientasi pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Untuk optimalisasi dan konsistensi penanganan perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif, diperlukan sebuah pedoman yang disusun secara efektif yang materi muatannya selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penegakan hukum.

Penyusunan pedoman tersebut menjadi salah satu tugas dari Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 238/KMA/SK/XI/2021 tanggal 23 November 2021.

## 10. Penyiapan Aturan tentang Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika

Jumlah pengajuan upaya hukum banding ataupun kasasi perkara narkotika cukup tinggi. Alasan pengajuan upaya hukum tersebut di antaranya didasarkan pada penilaian terjadinya inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara narkotika adalah sistem perumusan penjatuhan sanksi pidana (*strafmaat*) yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan lamanya pidana dan/atau besarnya denda di antara batas minimum dan maksimum sanksi pidana.

Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan pedoman pemidanaan dalam perkara narkotika yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas sehingga dapat mendorong kesatuan penerapan hukum dan mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Untuk penyusunan pedoman tersebut Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 265/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

## 11. Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

Penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam peta jalan pembaruan peradilan, agenda penguatan sistem kamar berlangsung mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Agenda penguatan sistem kamar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### a. Pemberlakuan Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2022

Mahkamah Agung memberlakukan kesepakatan pleno kamar sebagai pedoman penanganan perkara, baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya melalui surat edaran Mahkamah Agung. Kesepakatan pleno kamar tahun 2022 diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022.

### b. Pengaturan Komposisi Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali untuk Menangani Perkara Tertentu

Sebagian besar perkara kasasi/peninjauan kembali diadili oleh majelis dengan komposisi 3 orang hakim agung yang merupakan anggota dari kamar penanganan perkara yang bersangkutan. Untuk perkara tertentu, Mahkamah Agung menentukan majelis hakim yang akan mengadili perkara terdiri atas 5 hakim agung. Kriteria perkara tertentu tersebut di antaranya ialah perkara peninjauan kembali yang kedua dan perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal jumlah hakim pada kamar yang bersangkutan tidak memadai, komposisi majelis dapat ditetapkan lintas kamar. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 290A/KMA/SK/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dengan tujuan untuk menciptakan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

## PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### 1. Pengaturan Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Mahkamah Agung melakukan standardisasi format (template) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Template Putusan Tahun 2022 menerapkan nomor paragraf (*paragraf numbering*) yang berfungsi untuk otentikasi konten ketika putusan dipublikasikan dalam format/media yang berbeda dari aslinya, selain juga berguna untuk memudahkan pengutipan bagian putusan ketika dijadikan referensi oleh putusan lain, karya ilmiah, ataupun dalam dokumen upaya hukum seperti memori atau kontra memori kasasi.

### 2. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pembaruan Pola Rekrutmen

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya menata ulang organisasi manajemen perkara.

Beberapa ketentuan penting dalam pedoman rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut.

- Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya.
- Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi
- Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu sebagai berikut

- penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial;
- penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan;
- pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan; dan
- penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPAK.

### 3. Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk Mendorong Konsistensi Putusan

Pada tahun 2022, fokus pengembangan direktori putusan diarahkan pada peningkatan kemudahan akses. Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan direktori putusan versi mobile untuk pengguna perangkat android dan IOS. Pengembangan ini didasarkan pada data statistik yang diolah Google Analytic bahwa 70% pengguna mengakses direktori putusan melalui perangkat telepon seluler. Peningkatan kemudahan akses informasi putusan diharapkan sejalan dengan peningkatan konsistensi putusan.

Putusan yang dipublikasikan pada Direktori Putusan sepanjang tahun 2022 bertambah sebanyak 984.024 putusan. Dengan tambahan tersebut, jumlah koleksi putusan per tanggal 31 Desember 2022 mencapai 7.491.732 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2022 sebanyak 29.375 putusan. Kinerja publikasi putusan Mahkamah Agung tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 129,92% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mempublikasikan sebanyak 12.776 putusan.

### 4. Penguatan Fungsi Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung secara berkesinambungan melakukan upaya untuk memperkuat fungsi pemilahan perkara. Pada pertengahan tahun 2022, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 233/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Tim Revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor 269/KMA/SKXII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Salah satu tugas dari Tim Revisi adalah menyempurnakan tata kerja



pemilah perkara dan menyusun prosedur operasional standar dan template laporan pemilah perkara. Tim telah berhasil menyusun rancangan SK Perubahan dan telah memasuki tahapan pembahasan pada tingkat rapat pimpinan.

**5. Penyusunan Aturan Persidangan Pengucapan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali yang Dapat Diakses Publik**

Ketua Mahkamah Agung telah membentuk kelompok kerja persidangan dan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 321/KMA/SK/XI/2022 tanggal 9 November 2022. Pokja ini diberi mandat untuk menyusun aturan penyelenggaraan persidangan pengucapan putusan perkara kasasi/peninjauan kembali yang dapat diakses publik.

Gagasan utama persidangan terbuka di Mahkamah Agung adalah membuka kesempatan kepada pihak berperkara dan publik pada umumnya untuk memperoleh informasi amar putusan dalam waktu yang sama dengan putusan

tersebut diucapkan oleh majelis hakim. Sistem ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mencegah praktik kapitalisasi informasi yang merugikan pihak berperkara.

**6. Pembaruan Info Perkara Mahkamah Agung dengan Memuat Informasi Amar Putusan yang Lebih Terperinci**

Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan memorandum nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi amar putusan “kabul” dan “tolak perbaikan” pada SIP MA yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023. Setelah ada Memorandum tersebut, Situs Web Info Perkara MA memuat informasi amar yang lebih terperinci untuk perkara yang diputus “tolak” dan “tolak perbaikan”

**KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

**GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERKARA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2022**

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	175	28.109	28.284	28.024	0	260	99,08%
Pengadilan Tingkat Banding	2.467	25.737	28.204	25.254	42	2.908	89,69%
Pengadilan Tingkat Pertama	61.310	3.498.355	3.559.665	3.444.803	55.151	59.711	98,32%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11.580	57,29%
<b>Jumlah</b>	<b>76.130</b>	<b>3.567.138</b>	<b>3.643.268</b>	<b>3.513.611</b>	<b>55.198</b>	<b>74.459</b>	<b>97,96%</b>

## GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

### Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus ( <i>case-deciding productivity rate</i> ) di atas 70% dari beban perkara.	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara ( <i>clearance rate</i> ) berada di atas 100%.	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ( <i>on time case processing</i> ).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif ( <i>case backlog</i> ).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

### Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Perdata	16	6.551	6.567	6.541	26	99,60%
Perdata Khusus	11	1.928	1.939	1.939	0	100,00%
Pidana	10	1.655	1.665	1.663	2	99,88%
Pidana Khusus	124	9.191	9.315	9.290	25	99,73%
Perdata Agama/Jinayah	7	1.326	1.333	1.333	0	100,00%
Pidana Militer	0	380	380	380	0	100,00%
Tata Usaha Negara	7	7.078	7.085	6.878	207	97,08%
Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260	99,08%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
A	Perkara					
1	Kasasi	122	18.454	18.576	18.531	45
2	Peninjauan Kembali	44	3.426	3.470	3.414	56
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147
4	Grasi	9	60	69	64	5
5	Hak Uji Materiel (PPU)	0	76	76	69	7
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	0	0	0	0
	Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
B.	Perkara Nonkamar					
	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	1	1	0	1
C	NonPerkara					
	Permohonan Fatwa	0	27	27	27	0

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	6.551	6.921	105,65%
2	Perdata Khusus	1.928	1.957	101,50%
3	Pidana	1.655	2.379	143,75%
4	Pidana Khusus	9.191	11.584	126,04%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.326	1.497	112,90%
6	Pidana Militer	380	429	112,89 %
7	Tata Usaha Negara	7.078	6.688	94,49 %
	Jumlah	28.109	31.463	111,90 %

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	6.483	54	4	0	0	6.541
2	Perdata Khusus	1.930	9	0	0	0	1.939
3	Pidana	1.651	12	0	0	0	1.663
4	Pidana Khusus	9.185	74	28	2	1	9.290
5	Perdata Agama/Jinayah	1.331	2	0	0	0	1.333
6	Pidana Militer	378	2	0	0	0	380
7	Tata Usaha Negara	6.859	9	0	10	0	6.878
	Jumlah	27.817	162	32	12	1	28.024
	%	99,26%	0,58%	0,11%	0,04%	0,004%	

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.402	2.072	429	18	0	6.921
2	Perdata Khusus	1.615	299	43	0	0	1.957
3	Pidana	1.024	524	429	345	57	2.379
4	Pidana Khusus	5.925	2162	1.841	1.335	321	11.584
5	Perdata Agama/Jinayah	1.081	384	32	0	0	1.497

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
6	Pidana Militer	312	9	90	18	0	429
7	Tata Usaha Negara	6.195	339	145	9	0	6.688
Jumlah		20.554	5.789	3.009	1.725	378	31.455
%		65,34 %	18,40 %	9,57 %	5,48 %	1,20 %	

Tabel Perkara Belum Minutasi pada Tanggal 31 Desember 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1	Perdata	1300	2	0,15%	1298	99,85%
2	Perdata Khusus	161	1	0,62%	160	99,38%
3	Pidana	434	146	33,64%	288	66,36%
4	Pidana Khusus	2674	827	30,93%	1847	69,07%
5	Perdata Agama	104	0	0,00%	104	100,00%
6	Pidana Militer	38	1	2,63%	37	97,37%
7	Tata Usaha Negara	388	7	1,80%	381	98,20%
Jumlah		5099	984	19,30%	4115	80,70%

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2022

No	Kategori	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbandingan 2021-2022
1	Belum Putus	175	260	48,57%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	9.363	5099	45,54%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
		9.538	5359	43,81%

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Perdata	646	4.061	427	8	15	5.157
2	Perdata Khusus	305	1.018	531	18	5	1.877
3	Pidana	235	1.061	217	10	2	1.525
4	Pidana Khusus	769	3.857	3.162	38	1	7.828
5	Perdata Agama/Jinayah	142	741	200	57	1	1.141
6	Pidana Militer	12	279	56	18	0	365
7	Tata Usaha Negara	99	501	24	14	1	639
Jumlah		2.208	11.518	4.617	163	25	18.531
%		11,92 %	62,16 %	24,92 %	0,88 %	0,13 %	

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Perdata	145	1.217	0	20	2	0	1.384
2	Perdata Khusus	7	51	0	4	0	0	62
3	Pidana	22	102	0	3	0	0	127
4	Pidana Khusus	497	898	0	12	3	0	1.410
5	Perdata Agama/Jinayah	20	149	0	23	0	0	192
6	Pidana Militer	2	12	0	1	0	0	15
7	Tata Usaha Negara	34	178	3	9	0	0	224
8	Pajak	477	5.357	0	102	4	7	5.946
Jumlah		1.204	7.964	3	174	9	7	9.360
%		12,86 %	85,09 %	0,03 %	1,94 %	0,10 %	0,06 %	

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2022

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer	
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%
1.	Terdakwa	296	19,51%	2.717	35%	201	55,07%
2.	Jaksa/Oditur	934	61,57%	3.288	42,36%	153	41,92%
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	287	18,92%	1.757	22,64%	11	3,01%
Jumlah		1.517		7.762		365	

## Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 dengan merujuk pada indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2022 sebesar 99,08 %. Capaian tersebut 29,08% melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 99%. Perkara yang belum diputus pada akhir tahun berjumlah kurang dari 1 % beban perkara yang diterima.
- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 27.816 dari 28.024 perkara atau 99,26%. Ketepatan waktu memutus tersebut meningkat 1,49 % dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 97,77%.
- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 20.527 dari 31.463 perkara (65,24%). Ketepatan waktu minutasi itu meningkat 48,51% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 16,75% (3.612 perkara).
- 4) Tunggakan minutasi perkara dapat direduksi sebesar 64,48% dari tunggakan akhir tahun 2021 sebesar 45,66% (4.275 perkara) menjadi sebesar 19,30% (984) pada akhir tahun 2022.
- 5) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 111,90%.

## KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA DI LUAR PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

### Permohonan Grasi

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2022	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	11	12	11	1	91,67%
Pidana Khusus	8	49	57	53	4	92,98%
Pidana Militer	0	0	0	0	0	0%
Jumlah	9	60	69	64	5	92,75%

### Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2022

No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2022	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	0	22	22	20	2
2	Peraturan Pemerintah	0	10	10	9	1
3	Peraturan Presiden	0	7	7	6	1
4	Peraturan Gubernur	0	6	6	6	0
5	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
6	Peraturan Daerah	0	5	5	5	0
7	Peraturan KPU	0	5	5	4	1
8	Keputusan Menteri	0	2	2	2	0
9	Peraturan Mahkamah Agung	0	2	2	1	1
10	Kepala Staf TNI AL	0	1	1	1	0
11	Keputusan BPN	0	1	1	1	0
12	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
13	Peraturan Dirjen	0	1	1	1	0
14	Peraturan Kejaksaan RI	0	1	1	1	0
15	Peraturan Konsil	0	1	1	-	1
16	Peraturan Nagari	0	1	1	1	0
17	Qonun Aceh	0	1	1	1	0
18	Surat Edaran Dirjen	0	1	1	1	0
19	Surat Edaran Menteri	0	1	1	1	0
20	Surat Edaran Sekjen	0	1	1	1	0
21	Surat Keputusan Bupati	0	1	1	1	0
Jumlah		0	76	76	69	7

## Permohonan Fatwa

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 27 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No	Lembaga	Jumlah	%
1	Pemerintah Provinsi	8	29,63%
2	Kepolisian RI	5	18,52%
3	Kejaksaan RI	3	11,11%
4	Badan Pemeriksa Keuangan	2	7,41%
5	Badan Pertahan Nasional	2	7,41%
6	DPRD	1	3,70%
7	Kementerian Dalam Negeri	1	3,70%
8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	3,70%
9	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	3,70%
10	Ombudsman RI	1	3,70%
11	Pemerintah Kabupaten/Kota	1	3,70%
12	Partai Politik	1	3,70%
	Jumlah	27	

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.201	20.962	23.163	20.518	0	2.645	88,58%
Peradilan Agama	39	3.108	3.147	3.081	36	30	99,05%
Peradilan Militer	19	547	566	527	4	35	93,82%
Peradilan TUN	208	1.120	1.328	1.128	2	198	85,09%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11.580	57,29%
Jumlah	14.645	40.674	55.319	40.784	47	14.488	73,81%

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.355	2.840.594	2.877.949	2.835.185	4.998	37.766	98,69%
Peradilan Agama	23.060	652.080	675.140	604.822	49.517	20.801	96,92%
Peradilan Militer	124	2.859	2.983	2.722	10	251	91,59%
Peradilan TUN	771	2.822	3.593	2.074	626	893	75,15%
Jumlah	61.310	3.498.355	3.559.665	3.444.803	55.151	59.711	98,32%

## KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

### PERKARA E-COURT PERDATA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Perincian perkara e-Court pada tiga lingkungan peradilan dari tahun 2020 hingga 2022 sebagai berikut:

No	Badan Peradilan	2020	2021	2022	% kenaikan
1	Pengadilan Negeri	82.225	90.041	102.654	14,01%
2	Pengadilan Agama	102.690	132.869	177.769	33,79%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	2072	2.162	2.760	27,66%
TOTAL		186.987	225.071	283.183	25,82%

### PERKARA E-COURT PERDATA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1	Peradilan Umum	2.433	1.918	515
2	Peradilan Agama	412	346	66
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.172	826	346
Jumlah		3.562	4.017	3.090

### PENGGUNA LAYANAN E-COURT

No	Jenis Pengguna	2021	2022	Jumlah
1	Pengguna Terdaftar (Advokat)	44.693	7.442	52.135
2	Pengguna lainnya	158.416	70.941	229.357
Jumlah		203.109	78.383	281.492

### ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini menentukan bahwa seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu.



## Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik

No	Layanan Administrasi Perkara	Peradilan Umum	Mahkamah Syar'iyah	Jumlah
1	Pelimpahan berkas perkara	9.997	74	10.071
2	Izin/persetujuan penggeledahan	5.266	2	5.268
3	Izin/persetujuan penyitaan	19.048	117	19.165
4	Permohonan perpanjangan penahanan pengadilan tingkat pertama	8.086	26	8.112
5	Permohonan perpanjangan penahanan pengadilan tingkat banding	205	17	222
6	Permohonan izin besuk tahanan	8808	54	8862
7	Permohonan pinjam pakai barang bukti	159	1	160
8	Penetapan diversifikasi	204	0	204
9	Permohonan izin pembantaran	15	2	17
	Jumlah	51.788	293	52.081

## Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik

Perkara pidana yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik sepanjang tahun 2022 berjumlah 118.313 perkara. Jumlah ini berkurang 29,78% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 168.480 perkara. Penurunan jumlah persidangan elektronik dalam perkara pidana berkorelasi dengan membaiknya situasi pandemi yang menjadi salah satu alasan penyelenggaraan persidangan elektronik.

No	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
1	Pengadilan Tinggi Ambon	682
2	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	2.929
3	Pengadilan Tinggi Bandung	8.172
4	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	939
5	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	5.195
6	Pengadilan Tinggi Banten	3.761
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1.657
8	Pengadilan Tinggi Denpasar	1.916
9	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	5.222
10	Pengadilan Tinggi Gorontalo	259
11	Pengadilan Tinggi Jambi	2.456

No	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
12	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	7.159
13	Pengadilan Tinggi Jayapura	1.063
14	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	4.582
15	Pengadilan Tinggi Kupang	1.196
16	Pengadilan Tinggi Makassar	8.217
17	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	216
18	Pengadilan Tinggi Manado	1.545
19	Pengadilan Tinggi Medan	12.478
20	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	1.664
21	Pengadilan Tinggi Padang	3.228
22	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2.327
23	Pengadilan Tinggi Palembang	6.786
24	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	7.586
25	Pengadilan Tinggi Pontianak	3.531
26	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	1.883
27	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1.544
28	Pengadilan Tinggi Surabaya	15.721
29	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	2.715
30	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1.684
	Jumlah	118.313

## AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

### AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tingkat Pertama	38.444	120.285	470.560	448	2.270	2.037	595.600
Jumlah Perkara Banding	7.709	13.253	3.053	55	547	1.120	18028
Rasio Upaya Hukum Banding	20,05%	11,02%	0,65%	12,28%	24,10%	54,98%	3,03%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tingkat Pertama	79,95%	88,98%	99,35%	87,72%	75,90%	45,02%	96,97%

### AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN Jumlah	
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding	3.164	7.594	12.924	3.026	55	527	1.128	28418
Jumlah permohonan kasasi	1867	5150	9279	1100	34	365	659	18454
Rasio Upaya Hukum Kasasi	59,01%	67,82%	71,80%	36,35%	61,82%	69,26%	58,42%	64,94%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding	40,99%	32,18%	28,20%	63,65%	38,18%	30,74%	41,58%	35,06%

### AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2022

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1477	3790	1506	5212	991	195	507	13678
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	48	1309	88	297	128	11	0	1881
Rasio Upaya Hukum Peninjauan Kembali	3,25%	34,54%	5,84%	5,70%	12,92%	5,64%	0,00%	13,75%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	96,75%	65,46%	94,16%	94,30%	87,08%	94,36%	100,00%	86,25%

## PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2022

No	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	1401	64	1309	18	10
2	Perdata Khusus	61	1	48	0	12
3	Pidana	127	0	88	12	27
4	Pidana Khusus	1380	18	297	121	944
5	Perdata Agama	192	3	128	16	45
6	Pidana Militer	15	1	11	1	2
7	Tata Usaha Negara	250	15	0	4	231
	Jumlah	3426	102	1881	172	1271
	Persentase (%)		2,98%	54,90%	5,02%	37,10%
	PK Putusan Pengadilan Pajak	6093	45	0	0	6048
JUMLAH		9519	147	1881	172	7319

## PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

### PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2022

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	40.551	1.362	16.985	20863	1341
			3,36%	41,89%	51,45%	3,31%
2	Pengadilan Agama	68.831	19.499	47.705	1.243	384
			28,33%	69,31%	1,81%	0,56%
Jumlah		109.382	20.861	64.690	22.106	1.725
Persentase			19,07%	59,14%	20,21%	1,58%

### PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	5178	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%	93	65,49%
2022	5533	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%	5	7,46%

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah.

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2022	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%

## PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Sepanjang tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 685 perkara yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 462 perkara dan pemberitahuan sebanyak 223 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 45 pengadilan negeri dan 55 pengadilan agama dan ditujukan ke 50 negara dengan perincian sebagai berikut.

No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	45	350	158	508	41
2	Pengadilan Agama	55	112	65	177	27
Jumlah		100	462	223	685	51

## RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	2.877.949	675.140	2.983	3.593		3.559.665
	Jumlah Hakim	3688	2479	92	282		6541
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:780	1:272	1:32	1:13		544
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	2341	817	97	38		1633
2	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	23163	3147	566	1328	27115	55319
	Jumlah Hakim	904	431	29	54	58	1476
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:26	1:7	1:20	1:25	1:468	1:37
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	77	22	59	74	1403	112

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.590.903 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 287.046 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:298, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 895 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2022

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	8506	10980	1333	380	7085	28284
Jumlah Hakim Agung	16	15	6	4	6	47
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:532	1:732	1:222	1:95	1:1181	1:602
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	1595	2196	667	285	3543	1805

## RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	2.835.185	604.822	2.722	2.074		3.444.803
	Jumlah Hakim	3688	2479	92	282		6541
	Rasio	1:769	1:244	1:30	1:7		527
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	2306	732	89	22		1580
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	20518	3081	527	1128	15530	40784
	Hakim	904	431	29	54	58	1476
	Rasio	1:23	1:7	1:18	1:21	1:268	1:28
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	68	21	55	63	803	83

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2022

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	8480	10953	1333	380	6878	28024
Jumlah Hakim Agung	16	15	6	4	6	47
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:530	1:730	1:222	1:95	1:1146	1:596
Rerata produktivitas Tiap Hakim	1590	2191	667	285	3439	1789

## KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

### KONTRIBUSI DARI PNBP

No	Akun	Realisasi (Rp)
1.	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.970.000
2.	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.875.580.000
3.	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	24.899.000.000
4.	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.876.435.893
	Jumlah	79.833.985.893

## POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

### Putusan Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	14.224.485.864.936,00
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	3.787.963.336.551,90
	Jumlah	18.012.449.201.488,90

### Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda perkara Lalu lintas	242.486.431.583
2	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	57.948.236.656.489
3	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	18.433.314.502.287
	Jumlah	76.624.037.590.359

### Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1	Kejahatan	2.231	33.757.350.000	500.000.000	34.257.350.000
2	Pelanggaran	520	98.155.015		98.155.535
	Jumlah	2.751	33.855.505.015	500.000.000	34.355.505.535


## PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

### Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2022	30.532.748.430	
2	Penerimaan Tahun 2022	24.481.827.200	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2022		26.789.594.614
4.	Saldo Akhir 2022		28.224.981.016
	Jumlah	55.014.575.630	55.014.575.630

## Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	7709	150.000	1.156.350.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	3053	150.000	457.950.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1120	250.000	280.000.000
Jumlah				1.894.300.000



# Reformasi Birokrasi dan akses terhadap keadilan

## REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG PROGRAM PEMBARUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Sejak tahun 2011 seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) dituntut untuk berkomitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, target pada tahun 2025 adalah tercapainya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Memasuki tahapan sasaran lima tahun ketiga (2020-2024) dari *grand design* reformasi birokrasi nasional, Mahkamah Agung melakukan peningkatan kapasitas birokrasi melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

### Area I: Manajemen Perubahan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area I adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk internalisasi untuk memperbaharui *mindset* dan *culture set* seluruh Hakim dan aparatur peradilan, Mahkamah Agung kembali mempersembahkan film pendek “Pesan Bermakna Jilid II” yang diharapkan dapat membangkitkan rasa kebanggaan terhadap institusi peradilan, serta menumbuhkan semangat integritas dan nilai-nilai kejujuran. Penayangan perdana dilakukan pada hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-77.
2. Peluncuran film pendek berjudul “Keadilan Sang Hakim” yang merupakan hasil kerja sama Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diharapkan akan mendorong pola pikir hakim dan aparatur yang semakin berintegritas dan berkeadilan. Sejak penayangan perdananya pada bulan Desember 2022, film ini telah ditonton lebih dari 2.000 orang. Film ini ditayangkan pada kanal YouTube Mahkamah Agung, dengan tautan <https://www.youtube.com/watch?v=wZzDPJrUygA>.
3. Mahkamah Agung meraih penghargaan Merdeka Award pada kategori Program Inovatif untuk Negeri karena telah melakukan inovasi perubahan di bidang pelayanan publik melalui aplikasi E-Court, E-Litigasi,



Duta Peradilan 2022, Film Pesan Bermakna, MA Goes to Campus, dan juga program inovatif pendukung digitalisasi internal melalui aplikasi E-Bima, E-Sadewa, Sislitbang, dan Podcast Mari Berbicang.

## Area II: Deregulasi Kebijakan

Salahsatu capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area II adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Mahkamah Agung. Dari kegiatan harmonisasi tersebut Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan baru sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

## Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area III adalah sebagai berikut.

1. Peresmian operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding sebagai pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya murah dalam pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Peningkatan kelas pengadilan dengan jumlah terbanyak dalam sejarah Mahkamah Agung, yaitu 73 (tujuh puluh tiga) pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer berdasarkan persetujuan dari Menteri PANRB.

Kedua capaian Area III di atas diikuti dengan penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

## Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area IV adalah sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 pada kategori Badan Publik Lembaga Negara/Lembaga Negara Non-Kementerian (LN/LPNK) dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan nilai 97,16 (predikat informatif).
2. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan program-program kreatif,

antara lain “MARI Berbincang”, “Ruang Inspirasi”, dan “MA Goes to Campus”, yang dapat diakses oleh publik secara luas untuk memperoleh edukasi bidang hukum dan peradilan secara informatif dan menarik.

3. Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan situs Direktori Putusan menjadi Aplikasi Direktori Putusan yang dapat diunduh melalui *App Store* dan *Playstore* dan Direktori Putusan yang dapat diakses melalui aplikasi *Whatsapp*. Pengembangan ini merupakan salah satu perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam penyelenggaraan manajemen perkara.
4. Peluncuran Aplikasi *e-Prima (Electronic Procurement Implementation Management and Accountability)* yang berfungsi untuk membantu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam mengelola pengadaan barang dan jasa yang terstruktur, jelas, logis, dan berbasis kinerja.
5. Majalah *ItWorks* menganugerahkan Top Digital Award on Digital Implementation Level Star #4 untuk Ditjen. Badilag serta penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atas komitmen dalam mendorong optimalisasi dan akselerasi inovasi berbasis TI dalam peningkatan kinerja dan layanan sehingga berkontribusi pada penguatan implementasi SPBE khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

## Area V: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area V adalah sebagai berikut:

1. Terpusatnya pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Mahkamah Agung dimulai dengan pelaksanaan *Assesment Center* Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung yang diselenggarakan di Pusat Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung menerima BKN Award Peringkat Pertama Kategori Penilaian Kompetensi karena keberhasilannya dalam penyelenggaraan manajemen

ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

3. Inovasi berupa aplikasi BIS (BADILUM Information System), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk proses kepegawaian dan pengolahan data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum yang inovatif, efektif, dan akurat. Proses kepegawaian meliputi proses promosi dan mutasi pegawai (TPM), data dukung proses kenaikan pangkat, data dukung proses pensiun, dan pencetakan surat-surat keputusan.
4. Inovasi berupa Aplikasi SIMTEPA (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama) untuk mendukung SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan Badilag terhadap pengambilan kebijakan promosi dan mutasi secara cepat, tepat, dan *paperless*.
5. Aplikasi *E-Remis (Electronic Resources Management Information System)* yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan fitur (1) sistem penilaian kinerja pegawai bulanan, (2) SKP tahunan, (3) visualisasi pohon kinerja, (4) cuti *online*, (5) pembuatan surat tugas, dan (6) izin keluar kantor pegawai.
6. Penandatanganan kerja sama dengan beberapa lembaga dalam hal pendidikan dan pelatihan, terutama mengenai peningkatan kapasitas hakim, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil), salah satunya adalah penandatanganan kerja sama dengan Universitas California (UCLA).

## Area VI: Penguatan Akuntabilitas

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VI adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Mahkamah Agung mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya sejak tahun 2012.
2. Mahkamah Agung menerima penghargaan sebagai Juara 1 Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kementerian/Lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 pada Anugerah Reksa Bandha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi kementerian/lembaga yang berhasil mengelola, memanfaatkan, menertibkan, serta menggunakan barang milik negara (BMN) dengan baik dan memanfaatkan jasa lelang negara.

3. Inovasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja berupa pembuatan aplikasi Cakra (Capaian Kinerja) tenaga teknis yang berfungsi untuk merekam capaian kinerja bagi seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.

### Area VII: Penguatan Pengawasan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VII adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dalam rangka preventif terhadap penyalahgunaan wewenang serta peningkatan sistem integritas pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pada tahun 2022 Badan Pengawasan telah melakukan evaluasi implementasi SMAP di beberapa pengadilan, 11 di antaranya dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat SMAP dengan perincian sesuai dengan peringkat hasil penilaian sebagai berikut.

No	Tahapan Evaluasi	Nama Unit Kerja	Predikat
1	Evaluasi II	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	A
2		Pengadilan Negeri Yogyakarta	A
3		Pengadilan Negeri Padang	C
1	Evaluasi I/ Penilaian Pembangunan	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A
2		Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	B
3		Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	B
4		Pengadilan Negeri Wates	B
5		Pengadilan Agama Jakarta Pusat	B
6		Pengadilan Negeri Gorontalo	C
7		Pengadilan Agama Batam	C
8		Pengadilan Negeri Medan	C

2. Penandatanganan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan.
3. Penugasan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dari Badan Pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparatur MA di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan.
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menugaskan *Mystery Shopper* sebanyak 26 orang di Kantor Mahkamah Agung yang hasil pemantauan dan pengawasannya secara periodik dilaporkan kepada Ketua Kamar Pengawasan MA.
5. Penambahan QR Code pada halaman info perkara guna menghindari informasi palsu yang menyerupai tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan juga menghindari adanya pemalsuan putusan.
6. Ketua Mahkamah Agung meluncurkan ACO (*Access CCTV Online*) pada bulan Maret 2022, yaitu sistem CCTV *online* terintegrasi dan terpusat di Ditjen Badilag yang berfungsi sebagai salah satu media pengawasan dan pemantauan perilaku disiplin, dan kinerja hakim dan aparatur Peradilan Agama, serta media pemantauan pemberian layanan terhadap masyarakat. Penerapan ACO berupa pemasangan total 4.064 (empat ribu enam puluh empat) titik kamera CCTV pada seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama mengantarkan keberhasilan Ditjen Badilag memperoleh rekor MURI untuk dua kategori, yaitu "Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV *Central* secara Daring Terbanyak" dan "Pemrakarsa Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV *Central* secara Daring Terbanyak".
7. Ditjen. Badimiltun menyelenggarakan *public campaign* berupa *talk show* dengan tema "Peran Ditjen Badimiltun dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara." Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan lintas instansi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MaPPI). Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun sinergi yang kuat lintas lembaga dengan melibatkan masyarakat umum demi pembangunan sistem penegakan

integritas pimpinan, hakim dan aparatur di lingkungan Ditjen Badimiltun, serta jajaran pengadilan di bawahnya. Kegiatan itu dapat diakses melalui kanal YouTube Ditjen Badimiltun dengan tautan [Talk Show: Menjaga Integritas Aparatur Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara](#).

## Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VIII adalah sebagai berikut:

1. Peresmian operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding baru dalam rangka peningkatan akses peradilan kepada masyarakat.
2. Peresmian 38 (tiga puluh delapan) gedung baru pengadilan tingkat pertama dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan bagi masyarakat.
3. Penganugerahan Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” oleh Kementerian PANRB kepada 4 (empat) unit kerja di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin (Indeks 4,68 Kategori A), Pengadilan Militer III-15 Kupang (Indeks 4,65 Kategori A), Pengadilan Agama Jambi (Indeks 4,6 Kategori A), dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Indeks 4,57 Kategori A).
4. Pada tahun 2022 Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik dalam penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.
5. Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bersama dengan 17 (tujuh belas) kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik sebagai langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.
6. Ditjen Badilum menyelenggarakan kompetisi di bidang pelayanan publik untuk memberikan motivasi kepada unit kerja di lingkungan peradilan umum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna layanan. Pelaksanaan penyerahan piagam penghargaan lomba dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta. Acara dihadiri oleh seluruh Pimpinan Pengadilan yang mendapatkan juara lomba. Acara dibuka dan ditutup oleh Ketua Mahkamah Agung. Pada acara tersebut dilaksanakan juga peluncuran aplikasi pada Direktorat Jenderal Peradilan Umum antara lain:
  - a. Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi;
  - b. Aplikasi *Monitoring* Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi;
  - c. Aplikasi Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Peradilan Umum (Cakra);
  - d. Aplikasi Badilum Information System (BIS).
7. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Ditjen Badimiltun menyelenggarakan Perlombaan Pelayanan Pengadilan yang diikuti seluruh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan kategori penilaian sebagai berikut:
  - a. evaluasi Implementasi SIPP di pengadilan;
  - b. pengembangan Inovasi di pengadilan;
  - c. video Profile Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (DIPA 05) di pengadilan;
  - d. pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan di pengadilan; dan
  - e. penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada *Website* Pengadilan.

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung (Pusat) Tahun 2022 (*Unevaluated*)

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022 ( <i>Unevaluated</i> )
KOMPONEN PENGUNGKIT			
I	PEMENUHAN	20,00	19,76
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,83
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,47
4	Penataan Tatalaksana	2,50	2,23
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,95
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,45
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,93
II	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10,00	6,44
1	Sistem Merit		0,81
2	Kualitas Kebijakan		0,78
3	Kualitas Pengelolaan Aset		0,75
4	Aparatur Sipil Negara yang Profesional		0,47
5	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		0,50
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0,15
7	Kualitas Pengelolaan Anggaran		0,94
8	Kualitas Pelayanan Publik		0,90
9	Kapabilitas APIP		0,56
10	Maturitas SPIP		0,67
11	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		0,83
12	Kualitas Pengelolaan Arsip		0,37
III	REFORM	30,00	27,53
1	Manajemen Perubahan	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	3,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,13
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	3,10
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,31
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,51
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,72
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	52,33
KOMPONEN HASIL			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,22
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,91

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022 (Unevaluated)
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,84
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,16
TOTAL HASIL		40,00	35,12
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG (PUSAT)		100,00	87,45

Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2019 sampai dengan 2022

Tahun Evaluasi	2019	2020	2021	2022 (Unevaluated)
Indeks RB Mahkamah Agung	78,40	79,04	77,63	85,86

## PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)

Berdasarkan evaluasi eksternal pembangunan zona integritas tahun 2022 yang dilakukan oleh TPN terhadap 1060 (seribu enam puluh) unit kerja dari 250 (dua ratus lima puluh) instansi, diperoleh hasil, yaitu 102 (seratus dua) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBK dan 17 (tujuh belas) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBBM dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022. Dari 30 (tiga puluh) unit kerja yang diajukan Mahkamah Agung, sebanyak 6 (enam) unit kerja ditetapkan berpredikat WBK/WBBM dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) unit kerja berpredikat WBK; dan
2. 1 (satu) unit kerja berpredikat WBBM. Piagam WBK/WBBM diberikan pada acara “Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM” tanggal 6 Desember 2022.

## AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### PROGRAM PEMBARUAN

#### Perma Nomor 6 tahun 2022

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan melalui peradilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung menerapkan sistem peradilan secara elektronik. Sebagai dasar implemenasinya Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 6 Tahun 2022 menjadi payung hukum bagi pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

## Peningkatan pelayanan peradilan melalui persidangan elektronik

Dalam rangka mengimpelementasikan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Tabel Perkara *e-Court* dan *e-Litigation* di Badan Peradilan

No.	Lingkungan Peradilan	<i>e-Court</i>	<i>e-Litigation</i>
1.	Peradilan Umum	102.654	12.948
2.	Peradilan Agama	177.769	10.978
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	2.760	2.760
Total		283.183	26.686

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 telah menetapkan Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022.

## Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi, dan Diversi

### Gugatan Sederhana

Mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana merupakan salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian perkara. Sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 penyelesaian perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2022 pengadilan tingkat pertama telah menerima total sebanyak 7.131 perkara gugatan sederhana, yaitu sebanyak 6.875 perkara di lingkungan Peradilan Umum dan sebanyak 256 perkara di lingkungan Peradilan Agama. Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugatan sederhana, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 telah menetapkan Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022.

### Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung menetapkan mekanisme melalui mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator. Selama tahun 2022 terdapat 40.551 perkara mediasi di lingkungan peradilan umum yang 18.347 perkara telah dilaksanakan, 20.863 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan 1.341 perkara masih dalam proses. Sementara itu, di lingkungan peradilan agama terdapat 68.831 perkara mediasi yang 67.204 perkara telah dilaksanakan, 1.243 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan 384 perkara masih dalam proses. Dengan demikian, total perkara mediasi selama tahun 2022 adalah 109.382 perkara. Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 telah menetapkan Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022.

## Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

### Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Perdata

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja layanan eksekusi putusan, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 telah menetapkan Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022.

### Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi ke masyarakat, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 telah menetapkan Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022.

### Keadilan Restoratif

Pelaksanaan *restorative justice* yang masih terbatas pada diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Pada tahun 2022 jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 154 perkara dengan rincian jumlah perkara yang berhasil diversifikasi sebanyak 27 perkara, sedangkan jumlah perkara yang gagal diversifikasi sebanyak 35 perkara, dan jumlah perkara yang belum diproses diversifikasi sebanyak 92 perkara.

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum sampai dengan Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi	30
2.	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	15
3.	Pengadilan Negeri Kelas I A	53
4.	Pengadilan Negeri Kelas I B	114
5.	Pengadilan Negeri Kelas II	200
	Jumlah	412

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama sampai dengan Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama	29
2.	Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Agama Kelas I A	82
3.	Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Agama Kelas I B	108
4.	Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Agama Kelas II	222
	Jumlah	441

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer sampai dengan Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Militer Utama	1
2.	Pengadilan Militer Tinggi	3
3.	Pengadilan Militer	19
	Jumlah	23

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
	Jumlah	34

### Inovasi Pelayanan Publik

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2022, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dalam rangka percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana yang meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, permohonan izin pinjam pakai barang bukti, dan penetapan diversifikasi.
2. Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan pengadilan tinggi untuk menilai tingkat kepatuhan pengisian data pada aplikasi SIPP, dan kesiapan pengadilan tinggi dalam mengimplementasikan register elektronik.
3. Aplikasi *Monitoring* Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum diisi secara lengkap dan dapat digunakan sebagai alat *monitoring* terhadap implementasi SIPP. Aplikasi ini akan mendorong terwujudnya penyelesaian perkara yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan bagi para masyarakat pencari keadilan.



4. Aplikasi Sislitbang (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan) merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan dan mempersingkat birokrasi dalam rangka mempercepat proses bisnis di puslitbang yang berguna bagi peneliti untuk mempercepat perencanaan program. Melalui sislitbang, warga peradilan dan masyarakat dapat dengan mudah mencari, menemukan, membaca, dan menyimpan hasil penelitian Puslitbang Kumdil MA dari gawai yang mereka miliki dalam dokumentasi yang rapi, mudah diakses, dan lengkap.
5. Badilag TV merupakan saluran youtube resmi Ditjen Badilag yang memuat 7 (tujuh) program unggulan di antaranya (1) tajuk utama yang memuat kebijakan strategis dan kegiatan terkini pimpinan Badilag dalam mewujudkan peradilan berkelas dunia; (2) lintas peradilan yang memuat informasi kegiatan dan inovasi-inovasi terkini dari berbagai satuan kerja pengadilan agama; (3) tokoh bicara yang menghadirkan tayangan wawancara ringan dari para tokoh peradilan agama dan tokoh nasional, baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas; serta (4) garis terluar yang menyajikan tayangan perjuangan aparaturnya pengadilan agama dalam melayani masyarakat di daerah pedalaman dan sulit dijangkau.
6. ACO (*Access CCTV Online*) merupakan alat untuk mendukung terwujudnya transparansi, pengawasan, dan *monitoring* kinerja seluruh unit kerja di lingkungan peradilan agama melalui pantauan CCTV yang terpasang sebanyak 9 (sembilan) titik pada tiap satker seluruh Indonesia (441 (empat ratus empat puluh satu) satker)
7. Aplikasi e-Bundling merupakan sistem aplikasi mendukung proses percepatan pengiriman dokumen perkara banding secara elektronik dari pengadilan pengaju ke pengadilan tingkat banding (perkara banding *non e-court*).
8. KinSatker adalah sistem informasi sebagai penunjang kerja satker yang meliputi pusat data perkara, pelaporan, *monitoring* evaluasi, penilaian, penyajian data laporan, dan statistik serta sarana komunikasi permasalahan aplikasi dan TI.
9. Penilaian Kinerja Triwulan sistem transparansi penilaian kinerja seluruh satker peradilan agama dari 25 (dua puluh lima) unsur penilaian meliputi administrasi teknis perkara, manajemen peradilan, dan integritas.
10. Gugatan Mandiri adalah aplikasi *online* penunjang layanan peradilan yang membantu pihak secara mandiri dalam pembuatan gugatan.
11. Aplikasi e-Survei merupakan aplikasi yang terkait pelaksanaan survei atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi korupsi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
12. Aplikasi e-Lap merupakan aplikasi terkait dengan pengiriman laporan perkara pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara yang mengintegrasikan data SIPP sebagai sumber data laporan.
13. Aplikasi Monekstun (*Monitoring* Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait eksekusi perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Aplikasi ini terintegrasi dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) satker masing-masing. Terdapat beberapa data yang belum tersedia pada aplikasi SIPP sehingga aplikasi ini memfasilitasi data-data tersebut untuk dapat diisi dan ditampilkan sebagai informasi. Aplikasi ini dapat diakses oleh publik pada laman <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>

## Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara  
**Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2022**

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan Umum	166
2.	Peradilan Agama	36.671
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	13
	Total	36.850

b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2022

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan Umum	111.368
2.	Peradilan Agama	372.834
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1.790
	Total	485.992

c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2022

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan Umum	1.059
2.	Peradilan Agama	56.039
3.	Peradilan Militer	438
	Total	57.536

d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah pada tahun 2022 telah memberikan layanan sebanyak 11.543 perkara.

### Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung pada tahun 2022 telah menetapkan 150 pengadilan sebagai percontohan dalam sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang akan diberi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas. Adapun 150 pengadilan tersebut ialah sebagai berikut.

### Keterbukaan Informasi Publik

a) Pelayanan Informasi

Tabel Data Publikasi Putusan

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Dipublikasi
1.	Umum	277.705
2.	Agama	660.861
3.	Militer	3.540
4.	Tata Usaha Negara	5.699
5.	Mahkamah Agung	29.378
	Total	977.183

b) Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya.

### DATA PELAYANAN INFORMASI PTSP PENGADILAN

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	1.900
2.	Layanan Informasi Badilum	182.447
3.	Layanan Informasi Badilag	333.928
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	187
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	842
	Total	519.304

c) Publikasi Melalui Media Cetak

**Majalah Mahkamah Agung**

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Pada tahun 2022 telah diterbitkan tiga edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 28 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 29 sebanyak 1.200 eksemplar, dan edisi 30 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah>.

**Newsletter Kepaniteraan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerbitkan satu edisi *Newsletter* Kepaniteraan dan 1 edisi majalah. *Newsletter* dapat juga diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/newsletter/Newsletter-Kepaniteraan-2022-edisi-16.pdf> dan majalah dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah>.

**Majalah Dandapala**

Dandapala (yang berarti penjaga keadilan) merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 151.000 eksemplar sejak tahun 2015 dan dicetak 3.500 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.

**Majalah Peradilan Agama**

Pada tahun 2022 majalah peradilan agama terbit dua kali, yaitu Edisi 20 pada bulan Juli 2022 mengangkat tema Membangun Kesatuan Hukum yang dicetak sebanyak 600 eksemplar, sedangkan Edisi 21 pada bulan November 2022 mengangkat tema Peradilan Agama Ramah Kelompok Rentan yang dicetak sebanyak 600 eksemplar. *Majalah Peradilan Agama* juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama>.

**Jurnal Hukum dan Peradilan**

Pada tahun 2022 *Jurnal Hukum dan Peradilan* telah menerbitkan tiga edisi, yaitu Volume 11 Nomor 1, Volume 11 Nomor 2, Volume 11 Nomor 3 yang masing-masing dicetak sebanyak 200 eksemplar dan dapat diakses secara elektronik melalui: <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.



# Manajemen Sumber Daya Manusia

## PROGRAM PEMBARUAN

Mahkamah Agung bergerak membentuk peradilan Indonesia yang agung berkelas dunia, untuk itu dibutuhkan Smart ASN yang berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, bersikap ramah melayani dan berjiwa wirausaha, serta memiliki jaringan yang luas. Sebagai asset (*human capital*), kinerja ASN dikelola dengan mengenali potensi dan kompetensi ASN.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

Sejak tahun 2018 Pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Inovasi dan peningkatan sistem pengelolaan SDM Mahkamah Agung terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. pengembangan SIKEP yang dilakukan selama tahun 2022 seperti yang diuraikan dibawah ini.

## SINKRONISASI DATA PEGAWAI DI SIKEP-SAPK BKN/SIASN

Pada tahun 2022, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung melakukan proses rekonsiliasi dan sinkronisasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya guna mengintegrasikan seluruh data yang ada dan membuat layanan kepegawaian lebih maksimal. Integrasi yang dilakukan terdiri atas *profiling* tabel data utama serta perancangan proses bisnis data utama pegawai yang ada di SIKEP dan SAPK.

Tabel Rekonsiliasi Data SIKEP dengan SAPK

No.	Kegiatan	Jenis Data	Jumlah (row)
1.	Rekonsiliasi dan perbaikan data anomali data pada SAPK	Pegawai belum melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM)	588
		Pegawai status CLTN namun statusnya belum berubah pada SAPK	3
		Perbaikan TMT PNS yang kosong pada SAPK	96
		Perbaikan data pegawai yang terprediksi pensiun namun seharusnya masih aktif	4.265
		Perbaikan TMT CPNS yang lebih besar tanggalnya dari TMT PNS	23
		Perbaikan data unit organisasi yang sudah tidak aktif	525

No.	Kegiatan	Jenis Data	Jumlah (row)
2.	Rekonsiliasi data SAPK dan SIKEP	Pegawai sudah nonaktif namun terdeteksi masih aktif di SAPK	4.486
		Rekonsiliasi data jabatan	3.417
		Rekonsiliasi data unor	3.786
		Data SKP pegawai tahun 2021 sesuai dengan PP 46	21.011
		Data SKP pegawai tahun 2021 sesuai dengan PP 30	21.011

## PENGEMBANGAN MODUL PINDAH ANTAR INSTANSI

Modul pindah antar instansi difungsikan untuk mempercepat proses usulan pindah antar instansi yang diterima oleh Biro Kepegawaian dengan cara menolak usulan pindah yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan memproses usulan yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Pengusul juga dapat melihat sejauh mana proses yang telah diusulkan.

## PENGEMBANGAN MODUL PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI KESEKRETARIATAN

Modul Promosi dan Mutasi Pegawai di kesekretariatan difungsikan untuk mempercepat proses promosi dan mutasi yang diterima oleh Biro kepegawaian dengan melakukan kontrol terhadap usulan dengan syarat yang belum lengkap dan memantau sejauh mana promosi dan mutasi telah diproses.

## PENGEMBANGAN MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

Modul Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional difungsikan oleh Biro Kepegawaian untuk mengelola administrasi pada jabatan fungsional dalam mengelola angka kredit beserta bukti yang dibutuhkan.

## PENGEMBANGAN MODUL PRESENSI BERBASIS KAMERA FOTO DAN KOORDINAT

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, demi menegakkan disiplin ditempat kerja, digunakan Modul Presensi Berbasis Kamera swafoto pada area koordinat lokasi kantor di waktu dan hari kerja yang telah ditetapkan.

## UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (UPK AC MARI)

UPK AC MARI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/SEK/SK/I/2020 Tentang Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung Republik Indonesia (UPK AC MARI), berdasarkan sistem merit melalui penilaian potensi dan kompetensi dengan kriteria objektif.

## KEGIATAN UPK AC MARI

Pada tahun 2022, UPK AC MARI melakukan beberapa kegiatan *penilaian potensi dan kompetensi* yang dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring sebagai berikut:

- a. Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	UPK AC MARI dan Satuan kerja masing-masing	17 s.d 20 Januari 2022	47
2	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	UPK AC MARI dan Satuan kerja masing-masing	22 s.d 24 Agustus 2022	53
	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	UPK AC MARI dan Satuan kerja masing-masing	11 s.d 12 Oktober 2022	12
Total				112

b. Pemetaan Kompetensi

Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Mahkamah Agung RI Umum Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Pemetaan Kompetensi dengan metode Assessment Center	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Gel. II)	Mei 2022	42
		Biro Kepegawaian	Juni 2022	24
		Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum	Juli 2022	34
		Pengadilan Tinggi Banten	September 2022	52
		Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Oktober 2022	68
		Pengadilan Tinggi Denpasar	November 2022	62
	Pemetaan Kompetensi dengan metode <i>rapid</i>	Badan Kepegawaian Negara (Gel. I)	Oktober 2022	480
		Badan Kepegawaian Negara (Gel. II)	November 2022	1001
Total				1763

c. Pemberian Umpan Balik Hasil Pemetaan Potensi dan Kompetensi

d. Penghargaan BKN Award 2022 terhadap Penilaian Kompetensi

## CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

Konsep *corporate university* diinisiasi oleh Mahkamah Agung dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai proses peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang dinamis dan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi yang diusung oleh Mahkamah Agung.

## PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menetapkan Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung 2022 berdasarkan seleksi objektif, Demikian Juga Demikian Juga Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi (BUA), Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

### REKRUTMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK)

Pada akhir tahun 2022 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebanyak 33.257 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	48									48
Hakim Tinggi Yustisial	60									60
Hakim Yustisial	219									219
Hakim		904	3.688	431	2.479	29	92	54	282	7.959
Hakim Ad Hoc	9	96	275							380
Panitera		706	3.976	491	2.783	21	83	82	305	8.447
Jurusita			1.796		1.175			7	73	3.051
SDM Non Teknis	850	808	4.496	595	3.768	97	264	121	350	11.349
Jabatan Fungsional	460	141	379	159	533	13	64	1	7	1.744
Total	1.637	2.559	14.335	1676	10.738	160	503	265	1.017	33.257

\* data SIKEP per 31 Desember 2022

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2022

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	1.079
2.	Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	23
3.	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	3
4.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	10
5.	Pemberhentian Janda/Duda	231
6.	Pemberhentian Anumerta	3
Total		1.349

Tabel Formasi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ahli Pertama - Widyaiswara	4
2.	Ahli Pertama - Perencana	67
3.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	64
4.	Ahli Pertama - Pengembang Teknologi Pembelajaran	1
5.	Ahli Pertama - Arsiparis	58
6.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
7.	Terampil - Arsiparis	719
Total		921

Tabel Formasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ahli Pertama - Dokter	3
Total		3

## REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

NO.	Jabatan	Jumlah Pelamar		Jumlah yang Lulus	
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama
1.	Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Surat Pengumuman Pansel Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM tahun 2022 Nomor 004/Pansel-HAM7/2022	68	63	4	4
2.	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Surat Pengumuman Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVII Nomor 51/Pansel/Ad Hoc TPK/VI/2022 Surat Pengumuman Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVIII Nomor 50/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2022	378	466	16	9
3.	Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industrial (tidak ada rekrutmen)	0	0	0	0
4.	Hakim Ad Hoc Perikanan Surat Pengumuman Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Nomor 58/Pansel/Ad Hoc P/VII/2022	0	157	0	11

## REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama (Formasi CPNS)

No	Jabatan	Jumlah
1	Pranata Komputer Keahlian	467
2	Pranata Komputer Keterampilan	14
3	Auditor	5
4	Analisis Kepegawaian	3
5	Arsiparis Keahlian	10
6	Arsiparis Keterampilan	331
TOTAL		830

Tabel Kenaikan Jenjang Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Pranata Komputer	5
2	Arsiparis	2
3	Pustakawan	2
4	Analisis Kepegawaian	6
5	Pranata Keuangan APBN	10
6	Auditor	3
7	Widyaiswara	2
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3
TOTAL		33

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Perencana	4
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	18
3	Widyaiswara	2
4	Analisis Kepegawaian	1
5	Assessor SDM Aparatur	3
TOTAL		28



**Tabel Peta SDM jabatan fungsional Tahun 2022**

No	Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
1	Pranata Komputer	60	35	153	48	286			2	24	608
2	Pustakawan	12	4	5	4	2	1			3	31
3	Widyaiswara	9									9
4	Auditor	33									33
5	Auditor Kepegawaian	8									8
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	11	22	17	20	16		1	1	3	91
7	Pranata Keuangan APBN	9	19	46	24	15			1	6	120
8	Analisis Kebijakan	1									1
9	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3									3
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	7	6		5						18
11	Perencana	6	2	3	5	1					17
12	Pranata Peradilan	223									223
13	Analisis Kepegawaian	31	27	3	35	48		6	5	19	174
14	Asesor SDM Aparatur	7									7
15	Dokter	3									3
16	Dokter Gigi	2									2
17	Perawat	6									6
18	Pranata Hubungan Masyarakat	2									2
19	Penerjemah	7									7
20	Arsiparis	17	24	146	22	160				12	381
JUMLAH		457	139	373	163	528	1	7	9	67	1744

## PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU

Berdasarkan hasil rumusan pleno kamar tahun 2022, Pimpinan Mahkamah Agung mengamanatkan untuk membentuk jabatan fungsional baru yang bidang tugas dan fungsinya adalah layanan pengadilan. Selain itu, perlu ditetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan UU ASN.

## PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	1
2.	Panitera Pengganti Dilmil III-17 Manado	1
3.	Panitera Pengganti Dilmil I-05 Pontianak	1
4.	Panitera Pengganti Dilmil I-02 Medan	1
5.	Panitera Pengganti Dilmil III-19 Jayapura	2
6.	Panitera Pengganti Dilmil I-01 Banda Aceh	1
7.	Panitera Pengganti Dilmil III-18 Ambon	1
Total		8

Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Golongan V	1
2.	Kasi Mutasi Panitera	1
Total		2

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) telah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepada 18.900 orang atau sebesar 57,70% dari jumlah sumber daya manusia Mahkamah Agung sebanyak 32.751 orang.

Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	2.730	11.226	411,21
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	7.549	7.674	101,66
Total		10.279	18.900	183,87

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) Tahun Anggaran 2022 serta Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menetapkan target peserta sebanyak 2.730 orang.

### PELATIHAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2022, pelaksanaan pelatihan sertifikasi terdiri atas dua program, yaitu Pelatihan Sertifikasi Program Prioritas Nasional dan Pelatihan Sertifikasi Program Non Prioritas Nasional. Jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional sebanyak 661 orang atau sebesar 101,69% dari jumlah target peserta sebanyak 650 orang. Sementara itu, untuk jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Non Prioritas Nasional sebanyak 283 orang atau sebesar 101,43% dari jumlah target peserta sebanyak 280 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	52	104
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	280	280	100
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	161	100,62
4.	Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	168	105,00
Total		650	661	101,69

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Non Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	36	90,5
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	40	48	120,5
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	81	101,25
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	77	96,25
5.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	40	41	102,5
Total		280	283	101,43

## PELATIHAN BERKELANJUTAN BAGI HAKIM /CONTINUING JUDICIAL EDUCATION (CJE)

Tabel Program Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim/Continuing Judicial Education (CJE) Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim Peradilan Agama	80	106	132,50
2.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Umum	80	94	117,50
Total		160	200	125,00

## PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah	30	33	110,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum	30	29	96,67
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	42	60	142,86
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	47	117,50
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	40	75	187,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	80	72	90,00
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	166	207,50
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin	40	34	85,00
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Hukum Filantropi Islam	40	41	102,50
10.	Pelatihan Teknis Yudisial TPPO Kalimantan Barat	40	29	72,50
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan	40	43	107,50
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	45	112,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan	30	30	100,00
14.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Blasphemy</i> Umum dan Militer	80	35	43,75
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat Mahkamah Syariah	40	40	100,00
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Upaya Administratif dalam Sengketa TUN	30	29	96,67
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer	30	30	100,00
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pencucian Uang	40	35	87,50

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	30	30	100,00
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Pembuktian Alat Bukti Elektronik (TUN)	30	37	123,33
21	Pelatihan Teknis Yudisial Khusus Kasus HAM	30	21	70,00
22	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	40	153	382,50
23	Pelatihan Teknis Yudisial Pranata Peradilan	0	231	NA
24	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Ontrechmatige Overheidsdaad (OOD)</i> / Perbuatan Melawan Hukum	0	27	NA
25	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Tingkat Banding Agama	0	44	NA
26	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pemgesahan Badan Hukum	0	30	NA
27	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris	0	38	NA
28	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan (TUN)	0	36	NA
29	Pelatihan Teknis Yudisial Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal	0	43	NA
Total		922	1.563	169,52

Tabel Program Pelatihan Khusus Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Uji Materiil (TUN)	40	27	67,50
2.	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Panitera dan Jurusita	40	37	92,50
3.	<i>Training of Trainers</i> Mediasi	40	35	88,00
Total		120	99	82,50

Tabel Program Pelatihan Singkat Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan singkat Hak Kekayaan Intelektual ( <i>elementary</i> )	100	113	113,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah	30	23	76,67
3.	Pelatihan Singkat tentang Peradilan yang Adil bagi Disabilitas	30	36	120,00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Singkat Hukum Perpajakan bagi Hakim Yustisial	0	30	NA
5.	Pelatihan singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik	0	32	NA
Total		160	234	146,25

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita Tahun 2022

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti	200	150	75,00
2.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	0	7.791	NA
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti	200	168	84,00
Total		400	8.109	2.027,25

## KERJA SAMA PELATIHAN

Pusdiklat Teknis Peradilan telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk Kerjasama dalam Hal Pembangunan Kapasitas dan Pengembangan Kebijakan di Bidang Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Oslo yang dilaksanakan pada 4 September 2022 di Oslo, Norwegia.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/ lembaga pemerintah ataupun non pemerintah, dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia Mahkamah Agung. Daftar Mitra Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK);
2. *International Organization for Migration (IOM)*;
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI;
5. *United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)*;
6. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Provinsi Aceh Cq. BPSDM Aceh;
9. *Stitching Studiecentrum Rechtspleging (SSR)*;
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN - ACT;
11. Bank Indonesia
12. Otoritas Jasa Keuangan;
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
14. Komisi Yudisial RI;
15. *International Commission of Jurist*;
16. *Raoul Wallenberg Institute (RWI)*;
17. Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
18. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*.

## BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya juga melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dapat dilakukan oleh setiap tingkat eselon I Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pencapaian kinerja pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan leadership sebanyak 7.674 orang (102,00%), dari target kinerja 7.549 orang. Disamping melakukan pelatihan bagi SDM aparatur Mahkamah Agung, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan tahun 2022 juga melakukan pengembangan kompetensi bagi para pelatih atau pengajar dengan pelatihan *training of trainer (ToT)* untuk muatan lokal substansi lembaga Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan profesional trainer bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah (BNSP) serta melakukan pelatihan profesional coach untuk 140 (seratus empat puluh) orang peserta bekerjasama dengan ESQ.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tahun 2022

No.	Pelatihan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Ahli	50	25	50,00
2.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Terampil	50	15	30,00
3.	Pelatihan Fungsional Teknis Kepegawaian	50	57	114,00
4.	Pelatihan Fungsional Chartered Accountant Auditor	0	1	NA
5.	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Muda	50	2	4,00
6.	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	50	6	412,00
7.	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer	50	32	64,00
8.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	50	5	10,00
9.	Pelatihan Fungsional Auditor Muda	50	3	6,00
Total		400	106	27,00

Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 juga mendapatkan penghargaan apresiasi *corporate university as learning heroes* dari PPM Manajemen dan *learning inisiator of the year*.

### PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Hakim Militer dan Anggota Militer, yang ditugaskan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, selain mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI juga diharuskan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) secara berjenjang guna menunjang profesionalisme dan pembinaan karier yang dipersyaratkan oleh Mabes TNI.

### TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 2.176 PNS Mahkamah Agung sebagai penghargaan yang dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 2749 pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya karena telah berbakti selama 8 dan 16 tahun (sewindu dan dwiwindu) lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

### PROMOSI DAN MUTASI

Pola promosi dan mutasi untuk SDM teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sedangkan promosi SDM nonteknis dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tahun 2022 Mahkamah Agung melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme seleksi terbuka dengan menjangkau dari lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta instansi lainnya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga melaksanakan seleksi pada jabatan Panitera Muda Perkara Perdata dan Panitera Muda Perkara Agama berdasarkan Pengumuman Panitera Nomor 2736/PAN/KP.04.5/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

## PENGGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Perencana	3
8.	Pranata Peradilan	232
9.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
10.	Staf Khusus Pimpinan	12
Total		528

## FIT AND PROPER TEST

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan, Panitera, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kalayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PT	15	12
2.	Calon Pimpinan PN Kelas IA Gel I	61	33
3.	Calon Pimpinan PN Kelas IA Gel II	27	25
4.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel I	61	33
5.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel II	59	48
6.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel III	27	21
7.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel I	71	45

No.	Uji Kepatutan dan Kalayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
8.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel II	60	45
9.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel III	73	55
10.	Panitera PT	15	12
11.	Panitera IA Khusus	19	10
12.	Panitera IA	24	12
13.	Panitera IB	92	65
Total		604	416

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kalayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	35	25
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	105	90
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	124	115
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA	139	113
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	0	0
Total		403	343

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang Belum ditempatkan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	18
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	10
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	47
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas II	12
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	0
Total		87

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Peradilan Militer Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe A	9	9
2.	Calon Waka Dilmil Tipe B	6	6
3.	Calon Hakim Militer Tinggi	11	8
Total		26	23

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Hakim Tinggi Gel. 1	10	7
2.	Calon Pimpinan PT TUN	12	8
3.	Calon Hakim Tinggi Gel. 2	11	9
Total		33	24

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding	13	7
2.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama	23	15
Total		36	22

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	52	104,00
Total		50	52	104,00

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	280	280	100,00
Total		280	280	100,00

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	161	100,32
Total		160	161	100,32

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	160	168	105,00
Total		160	168	105,00

### KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)

Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	40	41	102,50
Total		40	41	102,50





# Manajemen Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi

## PROGRAM PEMBARUAN

### TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Penggunaan sistem berbasis TI pada pengelolaan keuangan negara diimplementasikan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan e-Rekon&LK.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1. Aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

2. Aplikasi e-BIMA (*electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara akurat dan *real time*.
3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### MAHKAMAH AGUNG: "READY TO CHANGE" TO THE NEXT LEVEL

Pengelolaan aset negara berbasis Teknologi Informasi di Mahkamah Agung terus bertransformasi melahirkan fitur-fitur baru dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Hal ini merupakan bagian dari ikhtiar Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan atas kinerja pengelolaan aset negara secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

## PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung peradilan modern, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

## MANAJEMEN KEUANGAN

### LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan negara yang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun Tahun 2022 Mahkamah Agung telah melakukan inovasi antara lain sebagai berikut.

### PENGUNAAN SISTEM APLIKASI TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

Mulai tahun 2022, Mahkamah Agung menyusun Laporan Keuangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi tersebut memberikan tantangan yang besar dalam menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan karena SAKTI menggantikan seluruh aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN), dan Persediaan. Penggunaan SAKTI didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI merupakan suatu sistem aplikasi yang menjadi sarana bagi Satuan Kerja untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan menerapkan konsep *single database*, sistem *single entry*

*point, single database*, dan akuntansi berbasis akrual. SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan seluruh Kementerian Negara/Lembaga secara elektronik.

### REVISI PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Tahun 2022 Mahkamah Agung melaksanakan pemuktahiran pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual bersama Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Biro Perencanaan dan Organisasi dan Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung dalam rangka merevisi pedoman akuntansi yang diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pembahasan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2022 terkait pemuktahiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait aplikasi SAKTI masih berlanjut hingga tahun 2023.

### LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1013/SEK/SK/VIII/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, penilaian PIPK sudah dilakukan oleh tim penilai yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Selain itu, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022, ditetapkan dua akun signifikan, yaitu Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan (1171xx) dan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (52311x) yang diterapkan dalam PIPK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Tahun Anggaran 2022 oleh Tim PIPK Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 hal Penerapan dan Penilaian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 917 satuan kerja di seluruh Indonesia. Adapun uji petik Tim Penilai PIPK Mahkamah Agung berdasarkan Surat Kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor B-759/Bua.3/XI/2022 tentang Uji Petik Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2022 berjumlah 16 satuan kerja. Hasil Penilaian Mahkamah Agung Tahun 2022 terhadap 2 akun tersebut adalah Penilaian akun Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan (1171xx) adalah efektif dan Penilaian akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (52311x) adalah efektif.

## PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

### Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

### Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
2. Fleksibilitas
3. *Money Follow Program*

Dalam PMK Nomor 112 Tahun 2020 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut:

### Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp13.514,00 untuk volume 1.800 perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp12.319.345.000,00 untuk volume 7.072 perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp378.520.000,00 untuk volume 350 perkara
4	Perkara PHI < 150 jt	Rp816.686.000,00 untuk volume 600 perkara

## PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

### Pagu Alokasi Anggaran

#### Pagu Per Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Pagu Awal 2022	Tahap I Automatic Adjustment	Tahap II Automatic Adjustment	Tahap III Pemotongan Belanja Pegawai	Pagu Menjadi 2022
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)-(4)
1	Kepaniteraan	189.994.752.000,00	735.541.000,00	0,00	0,00	189.994.752.000,00
2	Badan Peradilan Umum	140.447.557.900,00	2.393.793.000,00	0,00	0,00	140.447.557.900,00
3	Badan Peradilan Agama	117.755.347.000,00	885.365.000,00	0,00	0,00	117.755.347.000,00
4	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	29.554.757.000,00	645.100.000,00	0,00	0,00	29.554.757.000,00
5	Badan Urusan Administrasi	11.127.467.300.000,00	590.253.718.000,00	393.585.822.000,00	262.798.287.000,00	10.864.669.013.000,00
6	Badan Pengawasan	40.160.741.000,00	3.842.951.000,00	0,00	0,00	40.160.741.000,00
7	Badan Litbang Diklat Kumdil	174.752.945.000,00	14.209.438.000,00	0,00	0,00	174.752.945.000,00
<b>Total</b>		<b>11.820.133.399.900,00</b>	<b>590.253.718.000,00</b>	<b>393.585.822.000,00</b>	<b>262.798.287.000,00</b>	<b>11.557.335.112.900,00</b>

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022

No	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1	2017	6.299.873.673.000,00	1.282.853.174.000,00	598.608.448.000,00	8.181.335.295.000,00
2	2018	6.502.571.088.000,00	1.391.065.704.000,00	584.505.090.000,00	8.478.141.882.000,00
3	2019	6.626.485.409.000,00	1.731.265.814.000,00	687.999.037.000,00	9.045.750.260.000,00
4	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
5	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00
6	2022	7.486.002.321.000,00	2.592.696.388.500,00	1.741.434.690.500,00	11.820.133.400.000,00

### Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2022 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp88.029.740.611,00 (delapan puluh delapan miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan 379 dokumen register hibah yang terdiri atas:

1. Hibah langsung berupa barang sebesar Rp56.650.020.952,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang Rp18.852.512.217,00

(delapan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) di antaranya merupakan hibah TAYL (tahun anggaran yang lalu);

2. Hibah langsung berupa uang sebesar Rp10.490.540.848,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
3. Hibah langsung berupa jasa sebesar Rp2.036.666.594,00 (dua miliar tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

## REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022						
No	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.777.778.441.000,00	10.550.318.336.840,00	97,89%	227.460.104.160,00	2,11%
	Program Dukungan Manajemen	10.777.778.441.000,00	10.550.318.336.840,00	97,89%	227.460.104.160,00	2,11%
2	Kepaniteraan	224.944.752.000,00	224.049.664.300,00	99,60%	895.087.700,00	0,40%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	10.732.829.000,00	10.698.378.097,00	99,68%	34.450.903,00	0,32%
	Program Dukungan Manajemen	214.211.923.000,00	213.351.286.203,00	99,60%	860.636.797,00	0,40%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00	137.759.308.647,00	98,09%	2.688.249.353,00	1,91%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	83.264.024.000,00	80.966.630.891,00	97,24%	2.297.393.109,00	2,76%
	Program Dukungan Manajemen	57.183.534.000,00	56.792.677.756,00	99,32%	390.856.244,00	0,68%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	117.528.170.000,00	115.413.439.194,00	98,20%	2.114.730.806,00	1,80%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	76.115.385.000,00	74.164.009.590,00	97,44%	1.951.375.410,00	2,56%
	Program Dukungan Manajemen	41.412.785.000,00	41.249.429.604,00	99,61%	163.355.396,00	0,39%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	28.306.269.000,00	27.934.610.602,00	98,69%	371.658.398,00	1,31%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.101.255.000,00	8.798.140.058,00	96,67%	303.114.942,00	3,33%
	Program Dukungan Manajemen	19.205.014.000,00	19.136.470.544,00	99,64%	68.543.456,00	0,36%
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
	Program Dukungan Manajemen	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
7	Badan Pengawasan	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Program Dukungan Manajemen	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.876.171.102,00	97,95%	235.593.813.898,00	2,05%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 MENURUT UNIT ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022						
NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.777.778.441.000,00	10.550.318.336.840,00	97,89%	227.460.104.160,00	2,11%
	a. Eselon I Pusat	3.476.457.303.000,00	3.426.842.510.044,00	98,57%	49.614.792.956,00	1,43%
	b. Daerah	7.301.321.138.000,00	7.123.475.826.796,00	97,56%	177.845.311.204,00	2,44%
2	Kepaniteraan	224.944.752.000,00	224.049.664.300,00	99,60%	895.087.700,00	0,40%

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022**  
**MENURUT UNIT ESELON I**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00	137.759.308.647,00	98,09%	2.688.249.353,00	1,91%
	a. Eselon I Pusat	58.886.062.000,00	58.431.664.237,00	99,23%	454.397.763,00	0,77%
	b. Daerah	81.561.496.000,00	79.327.644.410,00	97,26%	2.233.851.590,00	2,74%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	117.528.170.000,00	115.413.439.194,00	98,20%	2.114.730.806,00	1,80%
	a. Eselon I Pusat	43.871.933.000,00	43.697.144.677,00	99,60%	174.788.323,00	0,40%
	b. Daerah	73.656.237.000,00	71.716.294.517,00	97,37%	1.939.942.483,00	2,63%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	28.306.269.000,00	27.934.610.602,00	98,69%	371.658.398,00	1,31%
	a. Eselon I Pusat	21.479.734.000,00	21.399.558.665,00	99,63%	80.175.335,00	0,37%
	b. Daerah	6.826.535.000,00	6.535.051.937,00	95,73%	291.483.063,00	4,27%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
7	Badan Pengawasan	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.876.171.102,00	97,95%	235.593.813.898,00	2,05%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022**  
**PER JENIS BELANJA**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.221.624.126.000,00	7.048.275.842.412,00	97,60%	173.348.283.588,00	2,40%
2	Belanja Barang	2.678.566.652.000,00	2.634.148.006.563,00	98,34%	44.418.645.437,00	1,66%
3	Belanja Modal	1.614.279.207.000,00	1.596.452.322.127,00	98,90%	17.826.884.873,00	1,10%
	Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.876.171.102,00	97,95%	235.593.813.898,00	2,05%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022**  
**PER ESELON I**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	3.476.457.303.000,00	3.426.842.510.044,00	98,57%	49.614.792.956,00	1,43%
2	Kepaniteraan	224.944.752.000,00	224.049.664.300,00	99,60%	895.087.700,00	0,40%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	58.886.062.000,00	58.431.664.237,00	99,23%	454.397.763,00	0,77%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	43.871.933.000,00	43.697.144.677,00	99,60%	174.788.323,00	0,40%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	21.479.734.000,00	21.399.558.665,00	99,63%	80.175.335,00	0,37%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	188.504.054.000,00	186.725.260.485,00	99,06%	1.778.793.515,00	0,94%
7	Badan Pengawasan	36.960.741.000,00	36.675.551.034,00	99,23%	285.189.966,00	0,77%
	Jumlah	4.051.104.579.000,00	3.997.821.353.442,00	98,68%	53.283.225.558,00	1,32%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER AKUN TAHUN 2022 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022							
NO	AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	6.589.298.000,00	6.402.006.203,00	97,16%	187.291.797,00	2,84%
2	521241	Belanja Barang Nonoperasional-Penanganan Pandemi Covid-19	822.962.000,00	737.010.584,00	89,56%	85.951.416,00	10,44%
3	521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	18.720.340.000,00	17.914.053.780,00	95,69%	806.286.220,00	4,31%
4	522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	542.209.000,00	528.238.845,00	97,42%	13.970.155,00	2,58%
	Jumlah		26.674.809.000	25.581.309.412,00	95,90%	1.093.499.588,00	4,10%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

## PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2022 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2022			
No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	21.311.370,00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.495.799.657,00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.506.979.027,00
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.155.301.202,00
5	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00
6	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.970.000,00
7	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.875.580.000,00
8	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.899.000.000,00
9	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.876.435.893,00
10	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00
11	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	38.974,00
12	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	159.506.789,00
13	425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.575.000,00
14	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara	0,00
15	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	110.693.622,00
16	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.448.754.045,00
17	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	527.168.314,00
18	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	4.847.014.441,00

**REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2022 PER AKUN  
PER 31 DESEMBER 2022**

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
19	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	3.182.019.552,00
20	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	0,00
21	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non-TP/TGR Pensiunan PNS	281.795.607,00
22	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	275.943,00
23	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.830.495,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp105.635.489.858,00</b>

## PENGUNAAN DANA PNBP

NO	PERADILAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	Kepaniteraan	30,056,000,00	26,628,900,00	88,60%
2.	Peradilan Umum	3,676,507,000,00	3,355,417,817,00	91,27%
3.	Peradilan Agama	11,177,719,000,00	10,834,180,673,00	96,93%
4.	Peradilan Militer Tata Usaha Negara	174,754,000,00	152,581,892,00	87,31%
Total		15,059,036,000,00	14,368,809,282,00	95,42%

## PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 (TGR)

Tabel Kerugian Negara Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

Status Penyelesaian	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2022	Sisa Angsuran
<b>A SUDAH PENETAPAN</b>				
1 TGR Bendahara	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2 TGR Nonbendahara	253	3.113.789.047,00	3.101.289.047,00	12.500.000,00
3 Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
<b>B PROSES PENETAPAN</b>				
1 TGR Bendahara	1	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
2 TGR Nonbendahara	0	0,00	0,00	0,00
3 Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
<b>C INFORMASI</b>				
1 BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2 APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
<b>Jumlah</b>	<b>715</b>	<b>29.874.382.263,74</b>	<b>29.802.858.037,96</b>	<b>71.524.225,78</b>



## MANAJEMEN ASET

### CAPAIN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

#### Nilai Barang Milik Negara Mahkamah Agung

Dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai BMN Mahkamah Agung pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahunan TA 2022 (Data MONSAKTI hasil rekon internal Mahkamah Agung Periode Laporan per 31-12-2022)

adalah sebesar Rp30.240.493.727.590,00 (tiga puluh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Nilai BMN ini mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp701.308.381.628,00 (tujuh ratus satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2021 Audited sebesar Rp29.539.185.345.962,00 (dua puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2022 per 31 Desember 2022 dan TA 2021 Audited

No.	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2022	2021 Audited	(5) = (4)-(3)	%
1	2	4	3	(5) = (4)-(3)	%
A	<b>ASET LANCAR</b>	<b>24.927.473.722</b>	<b>21.944.823.818</b>	<b>2.982.649.904</b>	<b>0,12</b>
1	Persediaan	24.927.473.722	21.944.823.818	2.982.649.904	0,12
B	<b>ASET TETAP</b>	<b>35.149.907.732.799</b>	<b>34.139.879.211.834</b>	<b>1.010.028.520.965</b>	<b>0,03</b>
1	Tanah	19.832.254.516.549	19.805.288.980.810	26.965.535.739	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.289.142.098.416	3.808.622.153.369	480.519.945.047	0,11
3	Gedung dan Bangunan	9.822.901.170.355	9.582.390.434.389	240.510.735.966	0,02
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	259.317.937.736	258.176.969.852	1.140.967.884	0,00
5	Aset Tetap Renovasi	3.280.626.340	18.559.040.336	-15.278.413.996	-4,66
6	Aset Tetap Lainnya	48.790.125.209	49.445.018.506	-654.893.297	-0,01
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	894.221.258.194	617.396.614.572	276.824.643.622	0,31
C	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>222.661.698.828</b>	<b>225.113.660.713</b>	<b>-2.451.961.885</b>	<b>-0,01</b>
1	Aset Tak Berwujud	64.585.852.639	65.269.905.024	-684.052.385	-0,01
2	Aset Henti Guna	158.075.846.189	159.843.755.689	-1.767.909.500	-0,01
D	<b>Total Intrakomptabel</b>	<b>35.397.496.905.349</b>	<b>34.386.937.696.365</b>	<b>1.010.559.208.984</b>	<b>0,03</b>
E	<b>Penyusutan Intrakomptabel</b>	<b>5.157.003.177.759</b>	<b>4.847.752.350.403</b>	<b>309.250.827.356</b>	<b>0,06</b>
F	<b>Nilai Aset Netto Intrakomptabel (D-E)</b>	<b>30.240.493.727.590</b>	<b>29.539.185.345.962</b>	<b>701.308.381.628</b>	<b>0,02</b>
G	<b>Aset Ekstrakomptabel</b>	<b>27.290.202.692</b>	<b>22.429.659.750</b>	<b>4.860.542.942</b>	<b>0,18</b>
H	<b>Penyusutan Aset Ekstrakomptabel</b>	<b>16.814.410.317</b>	<b>16.402.757.657</b>	<b>411.652.660</b>	<b>0,02</b>
I	<b>Nilai Aset Netto Ekstrakomptabel (G-H)</b>	<b>10.475.792.375</b>	<b>6.026.902.093</b>	<b>4.448.890.282</b>	<b>0,42</b>
J	<b>Total Aset Intrakomptabel &amp; Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan(D+G)</b>	<b>35.424.787.108.041</b>	<b>34.409.367.356.115</b>	<b>1.015.419.751.926</b>	<b>0,03</b>
K	<b>Total Aset Intrakomptabel &amp; Ekstrakomptabel Setelah Penyusutan(F+I)</b>	<b>30.250.969.519.965</b>	<b>29.545.212.248.055</b>	<b>705.757.271.910</b>	<b>0,02</b>

## Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Usulan	TA 2023				
	Jumlah	Setuju	%	Tidak	%
Pengadaan	1.569	192	12,23	1.377	87,76
Pemeliharaan	15.327	11.450	74,70	3.877	25,30
Total	16.896	11.642	68,90	5.254	31,10

## Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2022		TA 2021	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelola Barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000 per unit/satuan/item	412	1.591.985.499.620	191	286.644.860.260
2	Pengguna Barang	BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 per unit /satuan/item	657	657.486.610.712	350	151.260.429.641

## Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Tahun 2022 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 4 Satker yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi pengalihan fungsi dari bangunan tempat sidang atau *zitting plaat* menjadi bangunan mes pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan; pengalihan fungsi bangunan gedung kantor tempat kerja menjadi bangunan gedung tempat ibadah permanen pada Pengadilan Agama Yogyakarta; pengalihan fungsi bangunan gedung kantor permanen menjadi bangunan mess pada Pengadilan Agama Buol dan Pengadilan Negeri Parigi.
2. Terdapat 159 Satker yang mengajukan surat penetapan sewa dari Pengguna Barang untuk melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp1.444.316.351,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dan telah disetorkan kepada kas negara.

Pemindahtanganan BMN tahun 2022 terdapat beberapa hal yang patut dicatat. antara lain:

1. Persetujuan penjualan sebanyak 136 dan persetujuan bongkaran melalui mekanisme penjualan sebanyak 23 dengan total nilai limit/nilai penjualan melalui lelang sebesar Rp478.518.225,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Sebagai perbandingan, nilai perolehan/harga perolehan BMN tersebut sebesar Rp430.959.379.765,00 (empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh

- sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
2. Persetujuan pemusnahan BMN atas pemusnahan aset tak berwujud dan barang persediaan sebanyak 31 surat persetujuan, dengan nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp2.372.304.452,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
  3. Diterbitkan 2 naskah Perjanjian Hibah, yaitu pada Pengadilan Agama Sampit dan Pengadilan Agama Barabai yang melakukan hibah keluar Barang Milik Negara ke Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp5.913.464.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hibah masuk tahun berjalan sampai dengan Desember 2022 senilai Rp62.769,928.401,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) di 161 pengadilan dengan 695 Naskah Perjanjian Hibah/BAST yang sudah disahkan.

### Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah

Tabel Sertifikasi BMN Berupa Tanah TA. 2022 Berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO	LINGKUNGAN	SUDAH BERSERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI	BELUM BERSERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI	TOTAL SUDAH DAN BELUM BERSERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI
1	Eselon I, Kantor Pusat	43 bidang, luas 166.333 m <sup>2</sup>	10 bidang, luas 19.395 m <sup>2</sup>	53 bidang, luas 185.728 m <sup>2</sup>
2	Umum	2.341 bidang, luas 4.521.944 m <sup>2</sup>	112 bidang, luas 319.813 m <sup>2</sup>	2.453 bidang, luas 4.841.757 m <sup>2</sup>
3	Agama	1.011 bidang, luas 2.459.483 m <sup>2</sup>	64 bidang, luas 262.834 m <sup>2</sup>	1.075 bidang, luas 2.722.317 m <sup>2</sup>
4	Militer	28 bidang, luas 66.063 m <sup>2</sup>	3 bidang, luas 9.637 m <sup>2</sup>	31 bidang, luas 75.700 m <sup>2</sup>
5	Tata Usaha Negara	93 bidang, luas 213.323 m <sup>2</sup>	7 bidang, luas 17.361 m <sup>2</sup>	100 bidang, luas 230.684 m <sup>2</sup>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>3.516 bidang, luas 7.427.146 m<sup>2</sup> (94.72%)</b>	<b>196 bidang, luas 629.040 m<sup>2</sup> (5.28%)</b>	<b>3.712 bidang, luas 8.056.186 m<sup>2</sup></b>

Sumber Data: e-SADEWA

### Kelanjutan Pembangunan Bertahap 85 Gedung Pengadilan Baru

Pembangunan secara bertahap 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Baru telah dimulai sejak tahun 2020.

Pada tahun 2020, sebanyak 25 pengadilan baru telah dimulai pembangunannya dan dilanjutkan pada tahun 2021 (*multi years*). Pada tahun 2022, sebanyak 25 pengadilan baru dialokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan sarana lingkungan dan penyempurnaan bangunan gedung. Berikut adalah data progress pembangunan gedung pengadilan tahun 2020 s.d. 2022.

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
Wilayah Barat				
1	MS Suka Makmue	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
2	PN Suka Makmue	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
3	PN Sei Rampah	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
4	PA Sei Rampah	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
5	PN Pulau Punjung	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
6	PA Pulau Punjung	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
7	PN Teluk Kuantan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
8	PN Pangkalan Balai	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
9	PN Koba	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
10	PN Mukomuko	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
11	PA Kepahiang	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
12	PN Gedong Tataan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021
13	PA Mesuji	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
14	PN Cikarang	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
Wilayah Timur				
1	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	Progress 93% Tahun 2022	Rencana 2023	Rencana 2023
2	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Progress 85% Tahun 2022	Rencana 2023	Rencana 2023
3	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
4	Pengadilan Negeri Penajam	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
5	Pengadilan Negeri Melonguane	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
6	Pengadilan Negeri Belopa	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
7	Pengadila Negeri Lasusua	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
8	Pengadilan Agama Lolak	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
9	Pengadilan Agama Ampana	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
10	Pengadilan Agama Malili	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
11	Pengadilan Agama Lasusua	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022

Pada tahun 2021 sebanyak 12 pengadilan baru memulai pembangunan dengan skema tahun jamak (*multi years*), dan berakhir di pertengahan tahun 2022. Pada tahun 2022, sejumlah 12 pengadilan baru dialokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan sarana lingkungan dan penyempurnaan bangunan gedung. Berikut data pembangunan 12 gedung kantor pengadilan baru yang dimulai pada tahun 2021 sampai 2022:

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
Wilayah Barat				
1	PN Blangpidie	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
2	PN Mentok	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
3	PA Pringsewu	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
4	PA Sukadana	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
5	PA Prabumulih	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022

No	Nama Pengadilan	Kondisi 100%		
		Bangunan	Sarling	Meubelair
6	PTUN Pangkal Pinang	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
Wilayah Timur				
7	PN Namlea	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
8	PN Wangi-Wangi	Tahun 2022	Rencana Tahun 2023	Tahun 2022
9	PA Penajam	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
10	PA Namlea	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
11	PA Belopa	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
12	PA Suwawa	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022

Pada tahun 2022 sebanyak 26 pengadilan baru memulai pembangunan dengan telah menerapkan usulan perubahan kedua SK KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI terkait luasan gedung, tata ruang, sarana prasarana kerja maupun disabilitas dan menggunakan skema tahun jamak (*multi years*). Berikut data pembangunan gedung kantor pengadilan baru yang dimulai pada tahun 2022:

No	Nama Pengadilan	Kondisi Pekerjaan Pembangunan (%)	
		Tahun 2022 (%)	Rencana Tahun 2023 (%)
Wilayah Barat			
1	PN Meureudu	25	75
2	PN Sibuhuan	45	55
3	PA Sibuhuan	25	75
4	PA Mukomuko	32	68
5	PA Bintuhan	54	56
6	PA Tais	63	37
7	PA Pangkalan Balai	75	25
8	PA Martapura	25	75
9	PA Muaradua	30	70
10	PA Pagar Alam	25	75
11	PA Gedong Tataan	80	20
12	PA Tulang Bawang Tengah	100	-
13	MS Blangpidie	80	20
14	MS Subulussalam	80	20
Wilayah Timur			
15	PN Dobo	5	95
16	PA Wangi-Wangi	40	60
17	PA Pulang Pisau	50%	50

No	Nama Pengadilan	Kondisi Pekerjaan Pembangunan (%)	
		Tahun 2022 (%)	Rencana Tahun 2023 (%)
18	PA Bolaang Uki	97,5	2,5
19	PA Kasongan	75	25
20	PA Boroko	100	-
21	PN Kaimana	25	75
22	PA Nanga Bulik	50	50
23	PN Bobong	21	79
24	PA Nanga Pinoh	50	50
25	PA Tutuyan	95	5
26	PA Rumbia	35	65

### Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pengadilan

Mahkamah Agung telah menyusun usulan Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 572/SEK/SK/IV/2022 tentang Tim Penyusun Pedoman Standardisasi Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, Prototipe Gedung Kantor Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

### Pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah melakukan renovasi dan pembangunan sarana/prasarana untuk meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja, antara lain renovasi Balairung Mahkamah Agung dan pembangunan Gedung Parkir yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Sedangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja aparatur, Mahkamah Agung telah melakukan pembangunan Rumah Jabatan Eselon I dan II, serta pembangunan Rumah Susun Negara Grha Mahkamah Agung. Semua itu dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

### Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung telah melakukan kontrak dengan konsorsium ABMN (Asuransi Barang Milik Negara) Tahun 2022. Nilai kontrak pengasuransian BMN sebesar Rp657.519.330,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Satuan kerja yang mengajukan asuransi BMN kepada Pengguna Barang yaitu Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi dengan Nilai BMN sebesar Rp402.357.570.362,00 (empat ratus dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan nilai premi sebesar Rp657.519.330,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama 10 bulan (Maret s.d Desember 2022). Hal ini dilakukan demi pengamanan aset yang dikuasai oleh seluruh satuan kerja. Berikut adalah lampiran polis asuransi BMN tersebut.

## Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Mahkamah Agung telah melakukan penyusunan dan pelaporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara Semester I secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tertib pelaporan terhadap pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Mahkamah Agung dan mendukung Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

## Penambahan Fitur-Fitur Baru pada Aplikasi E-SADEWA

Aplikasi kerja pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang dimiliki Mahkamah Agung yang dinamakan e-SADEWA (*electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) terus melakukan pengembangan fitur dan peningkatan fungsi.

Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah penambahan fitur pada modul pengelolaan BMN, yaitu fitur pemusnahan BMN dan fitur asuransi BMN. Fitur Pemusnahan BMN merupakan salah satu fitur yang mempermudah satuan kerja dalam melakukan penghapusan Barang Milik Negara. Sementara itu, fitur Asuransi BMN merupakan fitur yang sengaja dibuat sebagai salah satu cara dalam melakukan pengamanan aset dalam bentuk mitigasi terhadap bencana yang tidak mudah untuk diprediksi namun dampaknya sangat besar bagi pelayanan peradilan. Dengan fitur ini, satuan kerja dapat melakukan pengajuan usulan asuransi BMN melalui aplikasi e-SADEWA melalui pengadilan tingkat banding dan akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses. Selain itu, pengembangan pada Modul Pengadaan juga dilakukan melalui fitur Evaluasi Pengadaan dan Laporan Pengadaan. Fitur Evaluasi Pengadaan berguna untuk mengevaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satuan kerja sehingga dapat di peroleh kondisi terkini proses pelaksanaan di lapangan. Fitur Laporan Pengadaan berguna untuk mengakomodasi penyusunan laporan dan melihat rekapitulasi seluruh pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja yang dijadikan acuan baik dari tingkat banding dan tingkat pusat dalam memonitor satuan kerja dibawahnya.

## Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang pedoman standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana, serta prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dengan melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
2. Pendampingan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui aplikasi SIMAN pada satuan kerja agar presentase persetujuan usulan RKBMN dapat lebih ditingkatkan;
3. Penyelesaian *update* Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan memonitoring pelaksanaannya sehingga pencatatan aset negara yang dikelola Mahkamah Agung dapat ditatausahakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dihapuskan serta memperoleh biaya pemeliharaan;
4. Pelaksanaan koreksi dan penyederhanaan pencatatan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) bangunan gedung kantor di satuan kerja;
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SADEWA terutama fitur evaluasi pengadaan dan pelaporan dalam mengevaluasi pengadaan BMN;
6. Pelaporan data aset yang valid, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait pengelolaan aset melalui aplikasi e-SADEWA;
7. Pengembangan pola kerja secara digital dalam proses pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara melalui aplikasi e-SADEWA;
8. Perubahan prinsip 3T, bertambah menjadi 4T (tertib

fisik, tertib administrasi, tertib hukum dan tingkatkan PNBP);

9. Peningkatan *asset awareness* oleh *asset manager*, yaitu bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal oleh seorang *asset manager*;
10. Peningkatan mitigasi risiko yang tepat terhadap laporan permasalahan seputar aset; dan
11. Percepatan integrasi aplikasi digital yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (e-SADEWA, e-BIMA, SIKEP, dll.)

## MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum, Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE dengan melakukan pembaharuan serta inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.1.0
2. Aplikasi e-Court versi 4.0.0
3. Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung
4. Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI
5. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## KEGIATAN SERTIFIKASI ISO 20000-1:2018 SISTEM MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI telah berhasil meraih sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Layanan (SML). Penerapan SML merupakan suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi dan memberikan visibilitas berkelanjutan, kendali layanan dan peningkatan berkelanjutan.

## BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN DAN SOSIALISASI

Kegiatan- kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi yang telah dilakukan antara lain:

1. *Training of Trainer* fitur terbaru pada aplikasi e-Court versi 4.0.0;
2. *Training of Trainer* fitur terbaru pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi 5.1.0;
3. *Training of Trainer* aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung;



## RENCANA KE DEPAN

### RENCANA KERJA TAHUN 2023

No	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Operasional	Non Operasional	Jumlah
1	Dukungan Manajemen	9.937.879.247.000,00	2.143.689.548.000,00	12.081.568.795.000,00
2	Penegakan dan Pelayanan Hukum		164.649.615.000,00	164.649.615.000,00
Jumlah		9.937.879.247.000,00	2.308.339.163.000,00	12.246.218.410.000,00

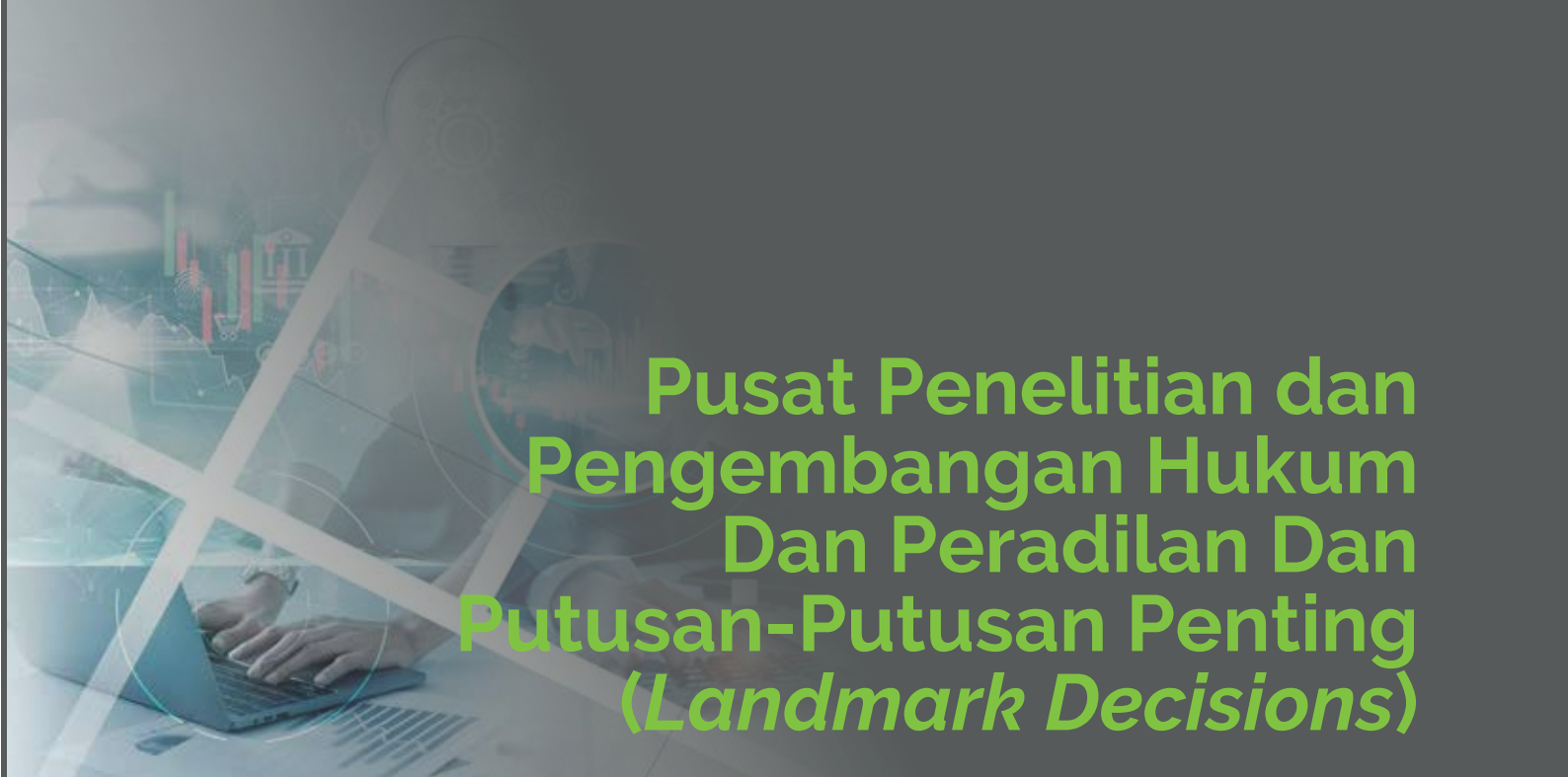
### Prioritas Nasional

No	Prioritas Kegiatan	Alokasi Pagu
1	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	1.500.000.000,00
2	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	500.000.000,00
3	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	106.350.000,00
4	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	5.817.295.000,00
5	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	11.136.800.000,00
6	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	2.588.588.000,00
7	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	9.952.830.000,00
8	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	20.858.318.000,00
9	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	22.413.120.000,00
10	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.004.416.000,00
11	Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	35.444.000,00
12	Perkara di Lingkungan Peradilan Militer yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	2.165.003.000,00
13	Pengembangan Prosedur Beracara secara Elektronik di Pengadilan (e-Court)	500.000.000,00
14	Pengembangan Portal Perkara Kepailitan dan PKPU	500.000.000,00
15	Pengembangan dan Monitoring Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1.000.000.000,00
16	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	2.184.000.000,00
17	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	2.184.000.000,00
18	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	2.184.000.000,00
19	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	2.784.000.000,00

### Prioritas Mahkamah Agung

No	Prioritas Kegiatan
1	Pembangunan 5 pengadilan relaksasi moratorium presiden
	a. Pengadilan Militer Jayapura
	b. Pengadilan Agama Temanggung
	c. Pengadilan Agama Tuban
	d. Pengadilan Agama Kuningan
	e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

No	Prioritas Kegiatan
2	Pembangunan lanjutan pengadilan tingkat banding baru 8 satker ( <i>carry over</i> TA. 2022)
3	Pembangunan.5 pengadilan tingkat banding baru
4	Carry over pembangunan lanjutan 22 satker baru tingkat pertama
5	Lanjutan renovasi mendesak krn kondisi alam/bencana :
	a. Pengadilan Agama Tanjung
	b. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan
	c. Pengadilan Agama Banggai
	d. Pengadilan Agama Slawi
	e. Pengadilan Agama Toli toli
	f. Pengadilan Tinggi Aceh
	g. Pengadilan Negeri Aceh
7	Lanjutan sarling 22 satker baru pembangunan TA. 2022
8	Renovasi mendesak satker
	a. Pengadilan Agama Negara Banjarmasin
	b. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
	d. Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh
	e. Pengadilan Negeri Painan
9	Printer untuk pengadilan
10	Pengadaan tanah PTA Medan/ PTA Semarang/PA Surabaya
11	Renovasi Rumah Dinas
12	Lanjutan meubelair 22 satker baru (TA. 2022)



# Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

## PROGRAM PEMBARUAN

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yang telah ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyoal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MARI) sebagai *research and development* untuk menjadikannya sebagai "*center of excellence*" sekaligus "*center of thinker*" bagi upaya pengembangan serta keberlangsungan organisasi Mahkamah Agung. Penguatan peran Puslitbang Kumdil MARI harus dikembangkan secara terus-menerus dengan harapan agar mampu memainkan fungsi dan perannya secara signifikan. Pelaksanaan fungsi Litbang harus dijalankan secara terprogram, sistematis dan ditunjang oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas, kompetensi serta didukung oleh anggaran yang memadai.

## PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut mempengaruhi keberadaan kelembagaan Puslitbang Kumdil MARI. Dengan adanya BRIN merupakan momentum yang tepat bagi Puslitbang Kumdil MARI kembali kepada tujuan pembentukannya sebagaimana Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yang sejak awal mendesain sebagai pengembang fungsi strategis: (1) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili; dan (2) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA. Dengan demikian, fungsi Litbang berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) merupakan modal penting untuk menuju pada MA sebagai organisasi pembelajar.

## SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SISLITBANG)

Implementasi Sislitbang dalam bisnis proses yang mendukung kinerja Puslitbang Kumdil MARI menjadi efektif dan efisien. Hal dimaksud dapat dilihat dalam fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Setiap penelitian maupun kegiatan akan diproses dan melewati aplikasi Sislitbang. Sehingga, administrasi, pelaporan, dan keuangan akan lebih rapi serta akuntabel. Selain itu Sislitbang sangat membantu bagi pimpinan untuk dapat melihat progress capaian, evaluasi maupun monitoring dari penelitian dan kegiatan yang sedang berjalan secara *real time*.

## PROGRAM PENELITIAN/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tabel Judul Naskah Akademik Puslitbang Tahun 2022

No.	Judul Naskah
1.	Analisis Hukum Terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011 (Kajian Terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama)
2.	Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Pasca PERMA No. 5 tahun 2019
3.	Naskah Akademik tentang Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan Sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Naskah Akademik tentang Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif
5.	Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
6.	Naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional
7.	Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat
8.	Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim Untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Sesuai PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2020
9.	Naskah Kebijakan Usulan Pembentukan Unit Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI
10.	Naskah Akademik Penugasan Dan Pembinaan Karier Bagi Prajurit TNI Pada Jabatan Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kerangka Sistem Satu Atap (One Roof System)
11.	Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim
12.	Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan
13.	Naskah Akademik Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI
14.	Naskah Akademik Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
15.	Naskah Akademik Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
16.	Naskah Akademik Sistem Kamar di Pengadilan Tinggi
17.	Naskah Kebijakan Pembentukan Corporate University pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

## KONTRIBUSI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN

Dalam rangka memberikan dukungan fungsi mengadili dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung, pada tahun 2022 Puslitbang Kumdil MARI berkontribusi dalam pembahsan isu-isu hukum dan peradilan bersama berbagai pihak seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintahan/lembaga negara lainnya, termasuk dengan pihak luar negeri.

## PUBLIKASI

### EKSISTENSI JURNAL PERADILAN DAN HUKUM (SUMBER RUJUKAN BERBAGAI PIHAK, NEGARA, PENINGKATAN SITASI DAN KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN ILMIAH)

Tabel 10 Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan Disitasi/Dikutip Terbanyak Hingga Tahun 2022

No.	Judul Artikel	Penulis	Jumlah Sitasi
1	Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama	A. Manan	69
2	Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pidanaaan	I. Ramadan	67
3	Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia	S.T. Wahyudi	66
4	Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum	A.Z. Muhdlor	59
5	<i>The Validity of Turkey-Libya's Agreement on Maritime Boundaries in International Law</i>	Y Gunawan, VJ Sastra, AT Prakosa, M Ovitarsi, LY Kurniasih	47
6	Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya	L. Mulyadi	47
7	Negara Berdasarkan Hukum ( <i>Rechtsstaats</i> ) Bukan Kekuasaan ( <i>Machtsstaat</i> )	Z.A. Muabezi	46
8	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	C. Irianto	42
9	Restorative <i>Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	R. Pradityo	41
10	Upaya Pelindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	N. Fadilla	41

(sumber: <https://scholar.google.co.id/citations>)

Tabel Jumlah Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan yang Telah Dikutip ke dalam Jurnal yang Terindeks Scopus

No.	Judul Artikel	Penulis	Jumlah Sitasi
1	<i>Regulation of Corporate Liability In Environmental Crimes</i>	Mardiya, N.Q.A.	7
2	<i>The Suitability of Sharia Life Insurance Policy For POJK 69/POJK.05/2016 and POJK No. 72/POJK.05/2016</i>	Lathif, A.A., Habibaty, D.M.	5
3	Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)	Martini, D., Haq, H., Sutrisno, B.	5
4	<i>The Principle of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations of The Parties in The Commercial Contract</i>	Hernoko, A.Y.	5
5	Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia	Djafar, E.M.	5
6	<i>Interpretation of Judges in Representing The Dynamics of Religion of Indigenous Legal Inheritance of Bali</i>	Mulyadi, L.	4
7	<i>The Quo Vadis of Banckruptcy Settlement and PKPU Laws on Sharia Banking</i>	Wahyudi, F.	4
8	Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan	Wijaya, E., Nopiandri, K., Habiburrohman, H.	4
9	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam	Manan, A.	4
10	<i>Charging Director of Company With Personal Bankruptcy for Company Mismanagement</i>	Shubhan, M.H.	3

(sumber : <https://scopus.com>)

## BUKU HASIL PENELITIAN

Hingga Saat ini telah tersedia 160 (seratus enam puluh) judul buku hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan yang dapat dibaca langsung (buku cetak), didengarkan (audio book), maupun diunduh (e-book) secara gratis dengan cara mengakses melalui link <http://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/>. Buku – buku tersebut merupakan hasil – hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MARI dari tahun 2010 s.d. 2021.

Sejak tahun 2021, buku – buku hasil penelitian Puslitbang Kumdil MARI dipublikasikan sesuai dengan

standar ilmiah oleh penerbit resmi bereputasi nasional (*publishing house*) untuk menjamin standar mutu dan kualitas penelitian. Standar ilmiah yang dimaksud antara lain adalah dilakukannya uji *similarity* terlebih dahulu melalui aplikasi *Turnitin* dengan batas maksimal kesamaan 30%, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan kompetensi terhadap hasil penelitian sebelum dilakukan pencetakan atau penerbitan. Selain itu, buku – buku hasil penelitian tersebut juga didaftarkan ke Perpustakaan untuk memperoleh nomor *International Standard Book Number (ISBN)* sebagai bukti keabsahan standar internasional buku – buku tersebut.

## PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

### PERKARA PIDANA

#### I. Putusan No. 3705 K/Pid.Sus/2021 tentang Karantina Kesehatan

Nomor Perkara	3705 K/Pid.Sus/2021 tanggal 11 Oktober 2021
Terdakwa	Moh. Rizieq bin Sayyid Shihab Alias Habib Muhammad Rizieq Shihab
Jenis Perkara	Tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. 3. Soesilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Nurjamal, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak tunduk pada suatu alasan pemeriksaan Kasasi
Klasifikasi	Tolak Kasasi Penuntut Umum

#### II. Putusan No. 1149 K/Pid/2022 tentang Subsideritas Pidana Penjara Diterapkan Terhadap Denda Pajak Yang Tidak Dibayar

Nomor Perkara	1149 K/Pid/2022 tanggal 12 Mei 2022
Terdakwa	Bilal Asif
Jenis Perkara	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. 2. Soesilo, S.H., M.H. 3. Suharto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Pidana denda tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana di bidang perpajakan
Klasifikasi	Perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi

## PERKARA PERDATA

### I. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang Perbedaan Perlakuan Terhadap Peserta Tender Bagian dari Persekongkolan Vertikal

Nomor Perkara	:	Nomor 1338 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
Para Pihak	:	<p><b>PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG</b>, yang diwakili oleh Drs. H. Azp Gustimigo, M.M., Direktur Utama, berkedudukan di Jalan P. Emir. M Noer Nomor 11 A, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H., &amp; Partner, beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor 109, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;</p> <p><b>PT BANGUN TJIPTA SARANA</b>, yang diwakili oleh Ir. Fatchur Rochman, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Bangun Tjipta Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi Building II Lantai 2 Suite 207 B-C, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;</p> <p><b>PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR</b>, yang diwakili oleh Ir. Sustiono Rushendarto, Direktur, berkedudukan di Office Tower Gandaria 8, 27th Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan 12240, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Bertiga Law Firm, beralamat di Estubizi Business Centre, Setiabudi Building II Lantai 2 Suite 207 BC, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;</p> <p>Para Pemohon Kasasi; Lawan <b>KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</b>, yang diwakili oleh Kodrat Wibowo, Ketua, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021; Termohon Kasasi;</p>
Jenis Perkara	:	Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.</li> <li>2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.</li> <li>3. Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.</li> </ol>
Panitera Pengganti	:	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	:	Menentukan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dan melakukan perubahan kriteria penilaian sebagai bentuk tindakan persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat.
Klasifikasi	:	Tolak Peninjauan Kembali

## II. 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Pembuktian Kepailitan Terhadap Rumah Susun Tidak Sederhana

Nomor Perkara	: Nomor 599 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Para Pihak	: <b>IRA SOIRAH</b> , bertempat tinggal di Kupang Indah 7/25, RT/RW 002/005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Habibie Mustaring, S.H., CCL., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021; Pemohon Kasasi; Terhadap <b>PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA</b> , diwakili oleh Direktur, Netty, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 127, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommi S. Siregar, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di STC Senayan, Lantai 4, Unit 1001, Jalan Asia Afrika, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022; Termohon Kasasi Dan <b>PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk</b> , berkedudukan di WIKA Tower 1, 7 th -10 Th Floor, Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 9, Jakarta Timur; Turut Termohon Kasasi;
Jenis Perkara	: <b>Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b>
Majelis Hakim	: I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaedah Hukum	: Fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap kreditur lain, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengingat kompleksitas dari implikasi dan kepentingan terhadap objek sengketa. Sehingga, pembuktian kausa Termohon PKPU tidak atau belum menindaklanjuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) memerlukan pembuktian lebih lanjut yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
Klasifikasi	: Tolak Kasasi

## PERKARA AGAMA

### I. Nomor 155 K/Ag/2021 Tentang Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dalam Ekonomi Syariah

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Tingkat Banding Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. Tingkat Kasasi Nomor 155 K/Ag/2021
Para Pihak	<b>FITRIYANTI</b> , bertempat tinggal di Jalan Bromo Lorong Amal Nomor 8 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulham Effendi Mukhtar, S.H., CN. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21 Kelurahan Kota Matsum 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2020; <b>Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;</b> L a w a n: <b>PT BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KARYA</b> , berkedudukan di Jalan Karya Nomor 79 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Asrama Kompleks Bumi Asri Nomor C-711 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020; <b>Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;</b>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah/Pelunasan Utang.



Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.
Kaidah Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam menentukan harga pelaksanaan lelang, pemegang agunan Hak Tanggungan memiliki hak untuk menentukan besaran harga limit dengan didasari pada ketentuan yang ditetapkan oleh <i>appraisal</i> yang independen.</li> <li>- Sebelum pemegang agunan Hak Tanggungan melaksanakan lelang, berdasarkan prinsip <i>ta'awun</i> dan berbagi risiko, maka demi mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa, hendaknya nasabah diberi kesempatan dalam waktu tertentu untuk membayar lunas kekurangan harga objek <i>murabahah</i> ditambah kekurangan margin (keuntungan) bank.</li> </ul>
Klasifikasi	Kasasi Dikabulkan

## II. Nomor 703 K/Ag/2021 tentang Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Wali Adhol

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS.. Tingkat Kasasi Nomor 703 K/Ag/2021
Para Pihak	<p>Ir. TRI WAHYONO BIN R. SOEMITROHARDJO, bertempat tinggal di Perumahan Sekardangan Indah Blok C 39 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;</p> <p><b>Pemohon Kasasi/Termohon;</b> L a w a n: <b>R. AY DEWI ARDIANIE BINTI R. SOEMITROHARDJO</b>, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Dalam F. 23 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan; <b>Termohon Kasasi/Pemohon;</b></p>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Wali Adhal.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 3. Drs. H. Busra, SH., MH.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	Harta Waris yang belum dibagi oleh janda dengan anaknya dapat menjadi alasan bagi wali untuk menunda pernikahan janda tersebut.
Klasifikasi	Kabul Kasasi

## PERKARA TATA USAHA NEGARA

### I. 120 PK/TUN/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha yang Diterbitkan Melanggar Azas Kecermatan

Nomor Perkara	120 PK/TUN/2021
Para Pihak	PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. 1. IRLAN ORUWO, 2. TORONEI POWANI, 3. PATMOS SALAPURA, 4. MAXIGALEMBA BALEBU, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Asimah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pembatalan dan penerbitan atas Sertifikat Hak Atas Tanah yang menyangkut luasan bidang tanah dengan didasarkan pada intensitas kepentingan hukum Penggugat;
Klasifikasi	Pertanahan

### II. 327 K/TUN/2021 tentang Jaminan Tenggang Waktu 90 Hari Bagi Penggugat untuk Mengajukan Gugatan TUN

Nomor Perkara	327 K/TUN/2021
Para Pihak	PT. ANGKASA PURA II (PERSERO), Sebagai Pemohon Kasasi Melawan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi I, II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Upaya Administratif yang diajukan melebihi Tenggang Waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pada lembaga Upaya Administratif tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan di PTUN, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
Klasifikasi	Sertifikat Hak Pakai

## PERKARA PIDANA MILITER

### I. Nomor 20 K/Mil/2022 tentang Penafsiran Pos Penjagaan dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM

Nomor Perkara	Nomor 20 K/Mil/2022
Terdakwa	Serda Yoo Hendra Laksamana
Jenis Perkara	Tindak pidana Prajurit meninggalkan pos penjagaan
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.
Kaidah Hukum	“Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.
Klasifikasi	Kabul Kasasi

### I. Nomor 332 K/Mil/2022 Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tidak Bisa Dipidana

Nomor Perkara	Nomor 332 K/Mil/2022
Terdakwa	Kopda Joko Haryanto
Jenis Perkara	Tindak pidana pembangkangan militer terhadap perintah dinas
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H.
Kaidah Hukum	Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian atau Rujuk Bagi Prajurit TNI oleh Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM
Klasifikasi	Tolak Kasasi



# Pengawasan

## **PROGRAM PEMBARUAN PENGEMBANGAN APLIKASI WASTITAMA (PENGAWASAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA)**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah membuat aplikasi Wastitama (Pengawasan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama). Aplikasi Wastitama merupakan Sistem Informasi Pengawasan Rutin/Reguler dan Sistem Informasi Monitoring yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama. Penggunaan aplikasi ini diantaranya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, memudahkan tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan reguler memudahkan satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama dalam penampaian hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan reguler, memudahkan tim pemeriksa dalam melakukan monitoring tindak lanjut dari satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama, efisiensi anggaran dalam melakukan monitoring atas pemeriksaan reguler ke pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama, dan bank data temuan dan tindak lanjut temuan.

## **PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) adalah suatu sistem manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penipuan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung menetapkan 16 (enam belas) satuan kerja untuk melakukan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu Mahkamah Agung melakukan Evaluasi Tahap II terhadap 7 (tujuh) Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan sertifikasi SMAP.

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan dilaksanakan dengan 4 mekanisme:

1. Tinjauan Dokumen adalah instrumen penilaian yang terdiri dari kegiatan pengumpulan dan penilaian dokumen-dokumen yang membuktikan diterapkannya sistem manajemen anti penipuan pada satuan kerja tersebut.

2. Uji Petik adalah instrumen penilaian dengan menjadikan beberapa kegiatan yang berdasarkan hasil *Risk Register* dari keseluruhan kegiatan satuan kerja sebagai contoh pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan.
3. Wawancara adalah instrumen penilaian yang berisi serangkaian pertanyaan tentang seluruh aktivitas SMAP disertai hasil penilaian masing-masing pertanyaan.
4. *Mysteri Shopping* adalah instrumen penilaian dengan cara menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung kepada satuan kerja dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati dan menilai berjalan atau tidaknya sistem manajemen anti penyuapan, menilai integritas pelayanan pengadilan dan menilai integritas aparaturnya.

## RAPAT KORRDISASI HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Penanganan Pengaduan serta Penguatan Sistem Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dengan peserta sejumlah 207 peserta. Rapat ini telah dilaksanakan beberapa kali seperti di Aceh pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 2022, Sulawesi Utara 20 s/d 22 September 2022, dan Surabaya pada tanggal 7 s/d 9 November 2022. Materi yang disampaikan pada rapat koordinasi diantaranya terkait pemuliaan peradilan, peran hakim pengawas bidang dalam peningkatan pelayanan publik, dan pembuatan lembar temuan dan laporan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang.

## SATUAN TUGAS KHUSUS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

Merespon atas terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dengan melibatkan

unsur Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pegawai yang memeriksa disiplin waktu kerja Aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dengan tujuan agar masuk dan pulang kantor tepat waktu. Selain itu, Satgasus juga mendata para tamu yang akan menghadap ke Hakim Agung dan Aparatur Peradilan dengan tujuan untuk memutus interaksi antara pihak berperkara dengan Hakim Agung yang memeriksa perkaranya. Kemudian Satgasus juga mengawasi terhadap ketaatan terhadap kode etik Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tidak berlarut-larut.

Temuan kegiatan Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dilaksanakan awal bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan jam kantor sejumlah 266 orang.
2. Pemantauan perkara yang belum dikirim ke Pengadilan Pengaju yang melebihi batas waktu 250 hari sejumlah 4.014 perkara.

## HOTLINE PENGADUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan Kantor Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan menyediakan hotline pengaduan khusus yang diperuntukkan bagi Pelapor yang akan mengadukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim dan Aparatur Peradilan di lingkungan Kantor Mahkamah Agung RI. Dengan adanya hotline pengaduan khusus ini Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terhadap Terlapor Hakim Agung, Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung melalui Hotline Whatsapp (Bawas Care) 081286078698 kemudian oleh sistem akan diteruskan ke Whatsapp Pimpinan Mahkamah Agung (Tuakawas).

## INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan

Mahkamah Agung menilai bahwa sidak salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja maupun perilaku Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Tahun 2022 Telah Dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Sejumlah 19 (Sembilan Belas) Satuan Kerja tingkat pertama.

## PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

### penanganan pengaduan

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2022

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.530
2.	Pengaduan dari instansi ( <i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	259
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.088
Total		3.877

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2022

No	Jenis Tindaklanjuti	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih Proses Penyelesaian	556
2.	Selesai diproses	3.321
	a. Diperiksa Tim Bawas	100
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	28
	c. Konfirmasi	86
	d. Klarifikasi	751
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	196
	a. Dijawab Surat	1.064
	b. Pelaksanaan Pemantauan	71
	h. Diarsipkan	103
	i. Gabung berkas	915
	j. Dicabut	7
Jumlah		3.877

## SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada Tahun 2022 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang hakim.

## PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	22	21	102	145
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2	Panitera	1	4	9	14
3	Sekretaris	3	2	4	9
4	Panitera Muda	1	5	20	26
5	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6	Jurusita	2	2	3	7
7	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10	Staf	9	4	6	19
11	PPNPN	1	-	-	-
Jumlah		52	52	167	271

Tabel Pemulihan Nama Baik Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim	95
2	Panitera	15
3	Sekretaris	3
4	Panitera Muda	12
5	Panitera Pengganti	12
6	Jurusita	3
7	Jurusita Pengganti	8
8	Pejabat Struktural	2
9	Staf	5
10	PPNPN	8
Jumlah		163

## DATA TINDAK LANJUT ATAS USUL PENJATUHAN SAKSI KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

Selama tahun 2022, Mahkamah Agung telah menerima 23 berkas Usul Penjatuhan Sanksi dari Komisi Yudisial (Data Terlampir). Jumlah hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi dari 23 berkas tersebut, adalah 50 orang. Terhadap 23 berkas (50 orang hakim) tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 10 berkas (bersesuaian dengan 11 orang hakim) ditindaklanjuti, di mana 9 orang hakim telah dijatuhi sanksi, dan 2 orang hakim diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim;
- 12 berkas (bersesuaian dengan 37 orang hakim) berkaitan dengan permasalahan teknis yudisial (Pasal 15 dan 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012), namun oleh Mahkamah Agung tetap dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap para Terlapor. Dari hasil pemeriksaan ulang dinyatakan 15 orang hakim terbukti melakukan pelanggaran dan oleh karenanya telah dijatuhi sanksi, sedangkan sisanya dinyatakan tidak terbukti karena materi pengaduan murni terkait dengan permasalahan teknis yudisial dan substansi putusan;
- 1 berkas (bersesuaian dengan 2 orang hakim) tidak ditindaklanjuti karena Terlapor telah diberhentikan sementara, menunggu putusan perkara pidananya.

## KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	23	33	9	11	76
Peradilan Agama	17	12	21	16	66
Peradilan Militer	1	3	2	1	7
Peradilan TUN	5	3	-	1	9
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>158</b>

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	501	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2.	Administrasi Persidangan	810	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, dll
3.	Administrasi Perkara	1.018	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, keuangan perkara, PNPB, dll.
4.	Administrasi Umum	1.755	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, dll.
5.	Kinerja Pelayanan Publik	673	Penanganan pengaduan, keterbukaan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (posbakum), PTSP.

## PEMANTAUAN (MONITORING)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Pengadilan

No	Jenis Pengadilan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
1	Pengadilan Tingkat Pertama	72	62	5	8	147
2	Pengadilan Tingkat Banding	4	4	2	1	11
<b>Total</b>		<b>76</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>158</b>
<b>Persentase</b>		<b>48%</b>	<b>42%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	

Tabel Klasifikasi Status Pemantauan Tindaklanjut

No	Bidang	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Manajemen Peradilan	429	46	28	2
2	Pelayanan Publik	543	92	17	9
3	Administrasi Perkara	787	174	44	12
4	Administrasi Persidangan	623	102	33	72
5	Administrasi Umum	1.414	270	70	8
Total		3.796	684	192	103
Persentase		79.5%	14.32%	4.02%	2.16%

## PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	16	7	9	39
Peradilan Agama	11	4	11	3	29
Peradilan TUN	1	-	1	1	3
Peradilan Militer	1	-	1	-	2
Jumlah	20	20	20	13	73

**Catatan:**

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

## HASIL TEMUAN AUDIT KINERJA BIDANG PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2022

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketaatan penyampaian panggilan lebih dominan yakni mencapai 280 (dua ratus delapan puluh) temuan (41,60%) dari 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketaatan penyampaian panggilan.

## HASIL TEMUAN AUDIT KINERJA BIDANG PELAKSANAAN EKSEKUSI TAHUN 2022

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi lebih dominan yakni mencapai 125 (seratus dua puluh lima) temuan (26,10%) dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

## HASIL TEMUAN AUDIT KINERJA BIDANG KEUANGAN PERKARA DAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2022

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait pengambilan sisa panjar lebih dominan yakni mencapai 123 (seratus dua puluh tiga) temuan (26,06%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya pengambilan sisa panjar.

## HASIL TEMUAN AUDIT KINERJA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN TAHUN 2022

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan Sarana dan Prasarana mencapai 208 (dua ratus delapan) temuan (65,20%) dari 319 (tiga ratus sembilan belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.



## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	
			2020	2021
1.	>90 - 100	AA	-	-
2.	>80 - 90	A	12	3
3.	>70 - 80	BB	53	65
4.	>60 - 70	B	9	6
5.	>50 - 60	CC	-	-
6.	>30 - 50	C	-	-
7.	0 - 30	D	-	-
Jumlah			74	74

## PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM)

Tabel Pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon 1 di lingkungan MA Calon Unit Eselon I Berpredikat WBK	1
2	Lingkungan Peradilan Umum a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	41 228
3	Lingkungan Peradilan Agama a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	69 321
4	Lingkungan Peradilan Militer a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	8 7
5	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	3 17
Total Unit Kerja yang diajukan		695

Tabel Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	133	21	95
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	562	107	472
Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/ WBBM	695	128	567

Tabel Jumlah Pengusulan Unit Kerja PMZI Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2022

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	133	7	126
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	562	23	539
Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/ WBBM	695	30	665

**Tabel Jumlah Rincian Hasil Pengusulan Unit Kerja PMPZI**

No	Unit Kerja	Jumlah	Lolos Panel TPI I	Lolos Evaluasi Lanjutan	Lolos Panel TPI II (Usul sesuai Kuota)
1	Eselon 1 di Lingkungan MA Calon Unit Eselon I Berpredikat WBK	1	1	1	1
2	Lingkungan Peradilan Umum c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	41 228	3 28	3 18	3 11
3	Lingkungan Peradilan Agama c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	69 321	17 77	12 42	3 11
4	Lingkungan Peradilan Militer c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	8 7	1 0	1 0	1 0
5	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	3 17	0 1	0 0	0 0
<b>Total Unit Kerja yang diajukan</b>		<b>695</b>	<b>128</b>	<b>77</b>	<b>30</b>

**Tabel Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2022**

No	Nama Unit Kerja
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
2	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3	Pengadilan Tinggi Gorontalo
4	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
5	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
6	Pengadilan Tinggi Agama Medan
7	Pengadilan Negeri Bengkulu
8	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
9	Pengadilan Negeri Jember
10	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
11	Pengadilan Negeri Mempawah
12	Pengadilan Negeri Pati
13	Pengadilan Negeri Singaraja
14	Pengadilan Negeri Tais
15	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
16	Pengadilan Agama Bengkalis
17	Pengadilan Agama Bulukumba
18	Pengadilan Agama Mimika

No	Nama Unit Kerja
19	Pengadilan Agama Padang Panjang
20	Pengadilan Agama Poso
21	Pengadilan Agama Sukoharjo
22	Pengadilan Agama Trenggalek
23	Pengadilan Agama Unaaha

**Tabel Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM Tahun 2022**

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Jakarta
2	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
4	Pengadilan Negeri Malang
5	Pengadilan Agama Jakarta Utara
6	Pengadilan Agama Lumajang
7	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

## PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PENGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung [www.SIWAS.mahkamahagung.go.id](http://www.SIWAS.mahkamahagung.go.id).
2. Layanan pesan singkat / SMS / WhatsApp.
3. Surat elektronik (email).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat dan atau.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi seluruh pengaduan baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2022 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI mengenai pungli di Pengadilan sejumlah 8 (Delapan) pengaduan.

Dari 8 Pengaduan tersebut 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan Konfirmasi, 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan Klarifikasi, 2 pengaduan diarsip dan 2 pengaduan di tindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SIP)

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2022

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut. a. Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2021 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2022. b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022. c. Laporan Keuangan Semester III Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2021 memperoleh opini WTP yang ke-10 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) selama tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu pada bulan September 2022
2.	Reviu RKA K/L	Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2023. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) atas kualitas penyusunan Pagu Anggaran MA sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2022.

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksian																																				
3.	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 87,45% dari rencana penyerapan dengan perincian sebagai berikut.</p> <p>Atas total realisasi sebesar Rp10.105.271.788.057,00 (87,45%) per 30 November 2022 tersebut dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp11.555.880.329.000,00. Selain itu, berdasarkan data dari spanint.kemenkeu.go.id tingkat penyerapan anggaran Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 9 dari 87 kementerian atau lembaga (data per 12 Desember 2022).</p> <p>Perbandingan rencana dan realisasi kontrak pengadaan barang/jasa tampak sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Posisi Pengadaan Barang dan Jasa</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Target PBJ s.d Triwulan IV Tahun 2022*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PBJ melalui Swakelola</td> <td>14.123</td> <td>1.005.767.467.992</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PBJ melalui Penyedia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tender cepat/Tender/Seleksi</td> <td>633</td> <td>1.469.724.578.100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ePurchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung</td> <td>4.213</td> <td>763.834.688.094</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Target PBJ s.d Triwulan IV 2022</td> <td>18.969</td> <td>3.239.326.734.186</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**</td> <td>22</td> <td>50.713.066.100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PBJ yang dilakukan sudah tanda tangan kontrak/dokumen serta kontrak***</td> <td>2.797</td> <td>1.819.982.727.138</td> </tr> </tbody> </table>	No	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	1	Target PBJ s.d Triwulan IV Tahun 2022*				a. PBJ melalui Swakelola	14.123	1.005.767.467.992		b. PBJ melalui Penyedia				- Tender cepat/Tender/Seleksi	633	1.469.724.578.100		- ePurchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung	4.213	763.834.688.094		Jumlah Target PBJ s.d Triwulan IV 2022	18.969	3.239.326.734.186	2	PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	22	50.713.066.100	3	PBJ yang dilakukan sudah tanda tangan kontrak/dokumen serta kontrak***	2.797	1.819.982.727.138
No	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)																																			
1	Target PBJ s.d Triwulan IV Tahun 2022*																																					
	a. PBJ melalui Swakelola	14.123	1.005.767.467.992																																			
	b. PBJ melalui Penyedia																																					
	- Tender cepat/Tender/Seleksi	633	1.469.724.578.100																																			
	- ePurchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung	4.213	763.834.688.094																																			
	Jumlah Target PBJ s.d Triwulan IV 2022	18.969	3.239.326.734.186																																			
2	PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	22	50.713.066.100																																			
3	PBJ yang dilakukan sudah tanda tangan kontrak/dokumen serta kontrak***	2.797	1.819.982.727.138																																			
		<p>Perincian progres pembayaran kontrak kerja tampak sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Realisasi Fisik</th> <th>Paket</th> <th>Nilai Kontrak (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0%</td> <td>263</td> <td>136.592.505.835</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1% - 25%</td> <td>18</td> <td>123.383.591.223</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26%-50%</td> <td>54</td> <td>82.596.484.374</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>51%-75%</td> <td>106</td> <td>334.317.376.281</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>76%-99%</td> <td>226</td> <td>266.623.179.007</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>100%</td> <td>2130</td> <td>876.469.590.418</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>2797</td> <td>1.819.982.727.138</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam reviu PA PBJ Triwulan IV adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik yang rendah pada pekerjaan konstruksi.</li> <li>Pengadaan tanah yang masih minim realisasi karena perencanaan yang kurang memadai.</li> <li>Kepatuhan terkait dengan ketentuan minimum PDN 40%.</li> <li>Belum dibentuknya Pokja atau Tim P3DN.</li> </ol> <p>PPK belum seluruhnya melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISWA P3DN ataupun E-Sadewa dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengadaan.</p>	No	Realisasi Fisik	Paket	Nilai Kontrak (Rp)	1	0%	263	136.592.505.835	2	1% - 25%	18	123.383.591.223	3	26%-50%	54	82.596.484.374	4	51%-75%	106	334.317.376.281	5	76%-99%	226	266.623.179.007	6	100%	2130	876.469.590.418		Jumlah	2797	1.819.982.727.138				
No	Realisasi Fisik	Paket	Nilai Kontrak (Rp)																																			
1	0%	263	136.592.505.835																																			
2	1% - 25%	18	123.383.591.223																																			
3	26%-50%	54	82.596.484.374																																			
4	51%-75%	106	334.317.376.281																																			
5	76%-99%	226	266.623.179.007																																			
6	100%	2130	876.469.590.418																																			
	Jumlah	2797	1.819.982.727.138																																			

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
4.	Reviu Revisi Anggaran	Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yakni sebagai berikut. a. Reviu pembukaan dan perubahan peruntukan anggaran (automatic adjustment) pada bulan Agustus 2022. b. Reviu pembukaan dan perubahan peruntukan anggaran pada bulan September 2022. c. Reviu Usulan Penambahan Anggaran MA RI Tahun 2022 pada bulan Juni 2022.
5.	Reviu atas Penerimaan PNBPN	Reviu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNBPN telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan. Reviu atas Penerimaan PNBPN dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2022.
6.	Reviu Hibah	Reviu hibah pada tahun 2022 dilaksanakan pada: a. Pengadilan Agama Kota Kediri, b. Pengadilan Agama Kuala Kurun, dan c. Pengadilan Agama Sampit.
7.	Liaison Officer (LO)	<b>Liaison Officer</b> /Pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI Sampai dengan semester II tahun 2022, Badan Pengawasan MA RI sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi <b>liaison officer</b> Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berdasarkan Surat Tugas Nomor 39/ST/V/XVI.1/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 22 April 2022 bertempat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Dalam rangka <b>liaison officer</b> /pendampingan atas kegiatan pemeriksaan tersebut Kepala Badan Pengawasan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 11/BP/ST/I/2022, 12/BP/ST/I/2022 dan 13/BP/ST/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. 2. Pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan peradilan perkara perdata gugatan dan dan pengelolaan keuangan perkara tahun 2021 dan semester I tahun 2022 pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut. 1) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Tugas Nomor 147/ST/V-XVI.1/09/2022 tanggal 26 September 2022, jangka waktu pelaksanaan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 2 Desember 2022. 2) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Surat Tugas Nomor 148/ST/V-XVI.1/09/2022 tanggal 26 September 2022, jangka waktu pelaksanaan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 2 Desember 2022.

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriks
		<p>Dalam rangka <i>liaison officer</i>/pendampingan atas kegiatan pemeriksaan tersebut Kepala Badan Pengawasan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 853/BP/ST/IX/2022 tanggal 28 September 2022.</p> <p>Tujuan kegiatan <i>liaison officer</i>/pendampingan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pemeriksaan oleh tim BPK sesuai dengan yang diharapkan dan dengan hasil yang maksimal.</li> <li>2. Dalam rangka mewujudkan tercapainya/mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.</li> <li>3. Dalam rangka meminimalisasi temuan pemeriksaan BPK RI.</li> </ol> <p>Ruang lingkup kegiatan <i>liaison officer</i>/pendampingan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan asistensi/pendampingan dalam pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh Tim Pemeriksa BPK RI dan menjadi penghubung kepada satuan kerja yang menjadi objek sampling pemeriksaan.</li> <li>2. Mendapatkan kesamaan data dan informasi dalam rangka kegiatan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI.</li> <li>3. Membantu Tim Pemeriksa BPK RI dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi selama kegiatan pemeriksaan, baik secara teknis maupun nonteknis sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan di lapangan.</li> <li>4. Memfasilitasi dan memediasi antara Tim Pemeriksa BPK RI dan Pihak Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksaan selama kegiatan pemeriksaan.</li> <li>5. Melakukan Cek Fisik bersama BPK RI atas Pekerjaan Fisik dan Belanja Modal pada Satuan Kerja yang menjadi objek sampling Pemeriksaan BPK RI.</li> <li>6. Memberikan saran/masukan untuk tanggapan dari satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa BPK RI.</li> </ol>
9.	Probit Audit	<p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi yang salah satunya terkait dengan pengadaan barang/jasa.</p> <p>Probit audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakkan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2021 probity audit dilaksanakan pada 5 (lima) satuan kerja, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadilan Negeri Blangpidie.</li> <li>b. Pengadilan Negeri Namlea.</li> <li>c. Pengadilan Agama Penajam.</li> <li>d. Pengadilan Negeri Martapura.</li> <li>e. Pengadilan Agama Pringsewu.</li> </ol>
10.	Audit PBJ	<p>Audir PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2022 audit PBJ dilaksanakan pada 6 (enam) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadilan Negeri Batam.</li> <li>b. Pengadilan Negeri Sengeti.</li> <li>c. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.</li> <li>d. Pengadilan Agama Lolak.</li> <li>e. Pengadilan Negeri Wangi-Wangi.</li> <li>f. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.</li> </ol>

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
11.	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan keuangan difokuskan pada pelaksanaan dan tata kelola keuangan DIPA dan keuangan perkara tahun 2022. Pemeriksaan keuangan dilaksanakan pada 8 (delapan) satuan kerja, yaitu sebagai berikut. a. Pengadilan Negeri Medan. b. Pengadilan Negeri Palembang. c. Pengadilan Negeri Serang. d. Pengadilan Negeri Bogor. e. Pengadilan Negeri Balikpapan. f. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. g. Pengadilan Tata Usaha Mataram. h. Pengadilan Negeri Jayapura.
12.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Penjaminan Kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI

## TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Tahun 2022 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Tahun 2022 yang terdiri dari 662 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp52.073.631.979,87 dengan 1.537 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp38.962.803.734,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.526 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp36.318.964.906,00.
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06.

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2022 telah selesai yaitu sebanyak 1.526 rekomendasi atau sebesar 100%.

## IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS TABEL JUMLAH PELAPORAN MASYARAKAT MELALUI SIWAS MA TAHUN 2022

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	885
2	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	157
3	Inisiatif Tingkat Banding	46
TOTAL		1.088

1.526  
Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi  
99,3%



11  
tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah  
0,7%

## LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.991 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 98,68%.



# PERAN SERTA DAN KERJASAMA

## KERJA SAMA MULTILATERAL

### COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES (CACJ)

#### Umum

Kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua CACJ berakhir pada sidang ke-10 (kese sepuluh) CACJ yang dilaksanakan di Kuala Lumpur 3--5 November 2022. Pada sidang ke-10 ini para Ketua Mahkamah Agung ASEAN secara aklamasi memilih Ketua Federal Court Malaysia the Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat menjadi ketua CACJ untuk periode 2022--2023 menggantikan Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang telah selesai masa jabatannya. Selain itu, pertemuan CACJ ke 10 (sepuluh) berhasil menyepakati Deklarasi Kuala Lumpur 2022 yang berisi rencana kerja CACJ selama satu tahun ke depan.

#### Workshop Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN serta Rapat Kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial

Mahkamah Agung sebagai Co-Chair Working Group Judicial Education and Training (WG-JET) CACJ bersama Mahkamah Agung Filipina, dengan dukungan ASEAN-USAID Prospect, menyelenggarakan program pelatihan Pengantar Kelembagaan dan Kerangka Hukum ASEAN

(Introductory Program on ASEAN Institution and Legal Instrument). Kegiatan berlangsung pada tanggal 5--6 September 2022 dan dihadiri oleh perwakilan dari 7 (tujuh) pengadilan di negara ASEAN meliputi Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapore.

#### THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

#### Seminar Hukum Persaingan usaha bagi Hakim Asia Pasifik ke-12

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bekerjasama (OECD)/Korea Policy Center (KPC) melaksanakan Seminar Hukum Persaingan Usaha bagi Hakim Asia Pasifik ke-12 (dua belas) secara daring pada tanggal 21 September 2022 dan dihadiri oleh 230 (dua ratus tiga puluh) orang peserta dari kawasan Asia dan Pasifik, termasuk 170 (seratus tujuh puluh) orang hakim dari Indonesia.



## WORLD JUSTICE PROJECT (WJP)

### Asia Pacific Justice Forum: Building Partnerships for the Rule of Law

Bekerja sama dengan World Justice Project (WJP), Mahkamah Agung menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan Asia Pacific Justice Forum 2022 yang diselenggarakan di Jakarta pada 8-9 Desember 2022. Forum ini menghadirkan tidak kurang 50 (lima puluh) orang perwakilan dari sektor pemerintah, swasta, organisasi internasional, akademik, dan masyarakat sipil berbagai negara dunia, di antaranya Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Selandia Baru, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand.

## KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

### KERJA SAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN BELANDA

Kerja sama antara badan peradilan Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda dilaksanakan di bawah kerangka Peer to Peer for Justice Indonesia-Netherlands Legal Network yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan Belanda dan Indonesia serta elemen masyarakat sipil.

### Implementasi Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda

Diawali kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad pada 12-13 Mei 2022, kedua belah pihak kembali mendorong kerja sama yang telah berlangsung dengan melanjutkan dialog intensif tentang penguatan implementasi sistem kamar untuk mendorong kesatuan hukum. Pada September 2022 Hoge Raad Kerajaan Belanda melakukan kunjungan balasan ke Mahkamah Agung RI dengan agenda evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad Kerajaan Belanda serta dialog yudisial pada topik-topik keadilan restoratif dan kesatuan hukum serta berpartisipasi dalam Indonesia Netherlands Legal Update.

### Peningkatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Mitra utama Mahkamah Agung RI terkait dengan kerja sama peningkatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan adalah dengan SSR Studiecentrum Rechtspleging/Study Center for the Judiciary. Pada tanggal 21--25 November 2022, delegasi Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI berkunjung ke SSR, *Utrecht*-Belanda dengan dukungan anggaran dari Nuffic Orange Knowledge Program (OKP).

### Peningkatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Dalam rangka penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja, sejak 2014 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Kerajaan Belanda (*Raad voor de Rechtspraak* atau RvdR) telah melakukan berbagai kegiatan dengan difasilitasi oleh Center for International Legal Cooperation-CILC) melalui Program Peer to Peer for Justice (P2P). Pada 14 April 2022, kerjasama terealisasi dalam bentuk Webinar internasional yang berjudul "Penganggaran Pengadilan Berbasis Kinerja: Tantangan dan Peluang" dilaksanakan pada 14 April 2022 melalui Zoom dan dibuka oleh Sekretaris M.A., Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., dan dihadiri oleh 382 peserta dari pengadilan seluruh Indonesia.

### Pelaksanaan Indonesia Netherlands Legal Update (INLU)

Pada 19-29 September 2022 Mahkamah Agung RI terlibat sebagai salah satu penyelenggara Forum Indonesia-Netherlands Rule of Law And Security Update 2022 (INLU). Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah pada dua panel, yaitu Panel 13 (tiga belas): *Effective Argumentation in Decision Writing* yang dilaksanakan bersama dengan SSR dan Panel 15 (lima belas): *Implementation of Restorative Justice by the courts in Indonesia and the Netherlands* yang dilaksanakan secara *hybrid*.

### KERJA SAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

#### Umum

Kerja sama antara Federal Court of Australia dan MA RI merupakan salah satu kerja sama bilateral di sektor peradilan yang berusia paling panjang. Pertama kali ditandatangani tahun 2004, kemudian pada tahun 2022

kerja sama itu memasuki tahun kedelapan belas dan masih dipenuhi dengan kerja sama intensif antara kedua lembaga.

## FEDERAL COURT OF AUSTRALIA (FCA)

### Rapat Kerja dan Perencanaan Program

Pada 24--26 Oktober 2022 bertempat di Sydney, Australia, kedua lembaga peradilan bertemu secara hybrid untuk melakukan dialog yudisial. Sepanjang 3 (tiga) hari kerja dialog Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan FCA mencakup lima topik penting dalam hukum perniagaan, yaitu hukum kepailitan, hukum kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, pelaksanaan putusan arbitrase, dan gugatan sederhana

### Kelas Inspirasi dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan

Justice Brigitte Markovitch memberikan ceramah tentang "Hukum Insolvensi Australia" pada kelas inspirasi dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga pada 22 Juli 2022.

### Partisipasi pada FGD Sinkronisasi dan Harmonisasi Kurikulum Pelatihan Hukum Kekayaan Intelektual

Justice Stephen Burley berpartisipasi dalam FGD Sinkronisasi dan Harmonisasi Kurikulum Pelatihan Hukum Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2022.

## FEDERAL CIRCUIT AND FAMILY COURT OF AUSTRALIA (FCFCoA)

### Dialog Internasional #BreakTheBias: Kebijakan yang Mendorong Peningkatan Peran Kepemimpinan Perempuan di Pengadilan

Bertepatan perayaan hari Perempuan Internasional dan hari Kartini, diadakan dialog internasional pada 21 April 2022 secara daring yang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Y.M. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H..

## Dialog Yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia mengenai Pelindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) mengadakan dialog yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia mengenai Pelindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian yang diadakan pada 27-28 Juli 2022 secara hybrid yang dihadiri oleh 100 orang peserta offline dan 600 orang peserta daring.

### Kunjungan Kerja ke Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA)

Pada 18--27 Oktober 2022 delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Y.M. Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, melaksanakan kunjungan kerja ke FCFCoA di Melbourne dan Sydney atas undangan dari FCFCoA. Kunjungan kerja ini difasilitasi oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan menandai dimulainya koordinasi yang lebih erat antara Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara-perkara keluarga.

## KERJA SAMA DENGAN KERAJAAN NORWEGIA

### Umum

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Norwegia melalui Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta telah memberikan berbagai dukungan teknis dalam penguatan pendidikan dan pelatihan hakim, khususnya dalam aspek hak asasi manusia dan hukum lingkungan.

### Bantuan Teknis Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia menyelenggarakan Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama untuk Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi Ketua Pengadilan, Panitera, dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia secara daring pada tanggal 5-7 Desember 2022.

Pelatihan dilaksanakan secara daring dan tercatat hadir 1.343 orang.

### **Kunjungan Kerja Pimpinan Mahkamah Agung RI**

Berdasar undangan dari Kedutaan Besar RI di Norwegia, Pimpinan Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke Norwegia pada 8--10 Mei 2022 untuk melakukan dialog, pematangan konsep, dan observasi institusi-institusi Norwegia dalam sektor hukum lingkungan, hak asasi manusia, pendidikan hakim, keadilan restoratif, dan kesatuan hukum. Delegasi dipimpin langsung oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI dan melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Norwegia, Pengadilan Distrik di Oslo, Norwegian National Courts Administration (Domstoladministrasjonen), Fakultas Hukum Universitas Oslo, Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Kepolisian Norwegia, National Mediation Commission, dan Kedutaan Besar RI di Norwegia.

### **KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITY CALIFORNIA IN LOS ANGELES (UCLA)**

#### **Penandatanganan Nota Kesepahaman**

Pada tanggal 29 Agustus 2022 Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menandatangani nota kesepahaman untuk menjalankan kerja sama pengembangan kediklatan dengan University of California atas nama Center for Southeast Asian Studies (CSEAS).

### **KERJA SAMA DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY INDONESIA (JICA)**

Pada tahun 2022, JICA telah melakukan beberapa kegiatan, baik secara daring maupun luring, yaitu: (1) Short course hak kekayaan intelektual, (2) Launching Casebook di Grand Hyatt Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Duta Besar Jepang, (3) Guidebook meeting, dan (4) Kegiatan lainnya seperti FGD, Seminar, JCC Meeting, dan Baseline Survey.

## **KUNJUNGAN KERJA INSIDENTAL MAHKAMAH AGUNG RI**

### **INGGRIS RAYA**

Kunjungan kerja ke Inggris Raya dilaksanakan pada 6 sampai dengan 8 Juni 2022 dengan bantuan fasilitasi dari Judicial Office of England and Wales dan Kedutaan Inggris di Jakarta. Mahkamah Agung RI memanfaatkan undangan ini untuk memperkuat reformasi prosedur perkara perdata dan niaga, menegakkan mekanisme putusan pengadilan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan.

### **ITALIA**

Kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung ke Italia difasilitasi oleh International Development Law Organization (IDLO) dan dilaksanakan berdekatan dengan rangkaian kunjungan kerja di Inggris, yaitu pada tanggal 9 Juni 2022.

### **IRAN**

Pada tanggal 5-9 September 2022, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. beserta delegasi melakukan kunjungan dinas ke Iran di dampingi oleh para hakim agung, yaitu Y.M. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Dr. H. Edi Riyadi, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., dan 2 orang Hakim Yustisial yaitu Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.L.M. Ph.D dan Dr. Armansyah, Lc., M.H.

## **KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN**

### **INTERNATIONAL COMMISSION JURIS (ICJ)**

#### **Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan**

Bertempat di Ayana Midplaza Hotel Jakarta, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan International Commission of Jurist (ICJ) menyelenggarakan Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan

Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 15-21 September 2022.

## **INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)**

### **Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan *International Organization for Migration* (IOM) menyelenggarakan Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) guna mewujudkan sumber daya manusia teknis peradilan yang profesional, berintegritas, independen dalam menyelenggarakan peradilan yang modern. Kegiatan dihadiri peserta sejumlah 30 peserta dengan metode pembelajaran blended learning dibagi menjadi 2 (dua) tahapan. Tahap pertama belajar mandiri melalui e-learning MA RI pada tanggal 31 Januari s.d. 03 Februari 2022 dan tahap kedua belajar secara klasikal pada tanggal 7--11 Februari 2022.

## **UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)**

### **Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kematitiman**

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bekerja sama menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kematitiman pada tanggal 14-26 Maret 2022 dengan peserta sejumlah 60 (enam puluh) orang yang terdiri atas hakim tingkat pertama peradilan umum seluruh Indonesia yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran blended learning.

### **Pelatihan Mystery Shopping (MS)**

Pada tanggal 6-10 Juni 2022, Badan Pengawasan MA RI bekerja sama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) melakukan pelatihan mystery shopping (MS) terhadap 26 (dua puluh enam) orang aparatur Mahkamah Agung, bertempat di Jakarta dan Bogor.

## **PELATIHAN DARING BAGI ANGGOTA BADAN PERADILAN (INDONESIA DAN MALAYSIA) DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA YANG MENGHADIRKAN BUKTI ELEKTRONIK**

Pada tanggal 17--18 Mei 2022 Mahkamah Agung bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan pelatihan secara daring bagi anggota badan peradilan (Indonesia dan Malaysia) dalam Persidangan Perkara Pidana yang menghadirkan bukti elektronik dengan peserta 20 (dua puluh) orang hakim Indonesia dan hakim dari Malaysia.

## **UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)**

### **Focus Group Discussion tentang Pengungsi Internasional dan Pelindungan Pengungsi Indonesia**

Pada tanggal 4-6 Desember 2022 diselenggarakan focus group discussion (FGD) di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta berkolaborasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

## **ASEAN-AUSTRALIA COUNTER TRAFICKING (ASEAN-ACT)**

### **Pelatihan Singkat dan Lokakarya dalam Rangka Memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang**

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN- Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) menyelenggarakan pelatihan singkat Pengadilan Sensitif Korban Untuk Hakim, Panitera Pengadilan, dan Aparat Penegak Hukum serta menyelenggarakan lokakarya Konsultasi Nasional: Penguatan Akses dan Pelaksanaan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang 2022 dengan dihadiri peserta sejumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas hakim tingkat pertama peradilan umum seluruh Indonesia yang

dilaksanakan dengan metode pembelajaran blended learning yang dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pelatihan singkat tatap muka pada tanggal 2--3 Agustus 2022 dan lokakarya konsultasi nasional pada tanggal 4 Agustus 2022.

## REFORMASI TERKAIT KEMUDAHAN BERUSAHA

Meskipun World Bank Group telah menghentikan publikasi Indeks Ease of Doing Business (EoDB) sejak September 2021, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk melanjutkan prioritas dan kebijakan di bidang peningkatan kemudahan berusaha. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa nilai strategis pada indikator-indikator kemudahan berusaha merupakan elemen penting dalam usaha reformasi peradilan yang dapat menunjang perbaikan ekonomi, khususnya pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain juga sinergi dengan pemerintah yang terus berkomitmen melanjutkan agenda reformasi yang telah digulirkan.

Selain beberapa capaian signifikan yang telah diraih, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung sosialisasi program dan kebijakan kemudahan berusaha di pengadilan, antara lain, yaitu (1) Anugerah Mahkamah Agung 2022, (2) Lomba Foto Peradilan 2022, (3) seminar skala nasional dan internasional dengan topik terkait perkara komersial dan perdagangan, termasuk keikutsertaan dalam forum SIFOCC 2022 di Australia dan kerja sama yudisial dengan Federal Court of Australia.

## PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL

### CHINA ASEAN JUSTICE FORUM 2022

Atas undangan Mahkamah Rakyat Agung China (Supreme People's Court China), delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri China-ASEAN Justice Forum ke-3 (tiga) yang diselenggarakan secara hybrid di Nanning, Daerah Otonom Provinsi Guangxi Zhuang pada tanggal 20 Juli 2022. Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H menghadiri acara tersebut secara daring dari Conference Center Lantai 12 Tower Mahkamah Agung RI.

### ASIA PACIFIC CHIEF JUSTICE FORUM 2022

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Syarifuddin, S.H., M.H. menghadiri Konferensi Virtual Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik yang diselenggarakan secara online 16-17 November 2022 di Hong Kong. Peserta hadir dari hampir semua ketua dan perwakilan mahkamah agung dari Asia Pasifik yang berjumlah total 34 (tiga puluh empat) negara, termasuk dari Amerika Serikat dengan menampilkan 18 (delapan belas) pembicara.

### WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUSTICE FORUM

Atas undangan World Intellectual Property Organization (WIPO), Mahkamah Agung berpartisipasi dalam Forum Hakim terkait hak kekayaan intelektual WIPO 2022 yang berlangsung dalam format hybrid (di Kantor Pusat WIPO di Jenewa, Swiss, secara virtual di platform Zoom) pada tanggal 16-18 November 2022.

### Asean Counter Trafficking in Person

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., pada 25 Maret 2022 menghadiri undangan dari the ASEAN-Australia Counter Trafficking program (ASEAN-ACT) untuk menjadi penanggap pada acara webinar daring bertema "Adaptive Justice responses on Trafficking in Persons under the New Normal" yang dihadiri oleh peserta dari kawasan ASEAN. Acara ini sekaligus merupakan peluncuran *Baseline Report on ASEAN Member States TIP Annual Reports* yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Jadi konvensi Asean Convention on Trafficking in Person.

### STANDING INTERNATIONAL FORUM FOR COMMERCIAL COURT (SIFOCC) KE 5

Pada 20--21 Oktober 2022 Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam Konferensi Standing International Forum for Commercial Court (SIFOCC) ke-5 (lima) yang diselenggarakan di Sydney Australia. Konferensi itu dihadiri oleh perwakilan dari 40 (empat puluh) negara anggota SIFOCC.

## **FORUM STRENGTHENING INSOLVENCY SYSTEMS IN ASIA AND THE PACIFIC**

Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Heru Hanindy, S.H., M.H. ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI untuk menghadiri undangan Asian Development Bank (ADB) dalam Forum Strengthening Insolvency Systems in Asia and the Pacific. Acara tersebut diselenggarakan pada 15--16 Desember 2022 di kantor ADB di Manila.

## **SYMPOSIUM ON JUDGES AND THE ENVIRONMENT**

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menghadiri simposium Hakim dan Lingkungan di Stockholm tanggal 31 Mei s.d. 1 Juni 2022. Simposium bertajuk Impact of the Stockholm Declaration in Shaping Global Environmental Law and Jurisprudence dilaksanakan bersamaan dengan UN Stockholm+50 Conference.

## **OSLO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE 2022**

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menghadiri 2022 Oslo International Environmental Law Conference. Konferensi dengan tema "The Transformative Power of Law: Addressing Global Environmental Challenges" diselenggarakan oleh World Commission on Environmental Law (WCEL) International Union for the Conservation of Nature (IUCN) bekerja sama dengan Faculty of Law University of Oslo (UiO) tanggal 3--6 Oktober 2022 di Fakultas Hukum University of Oslo, Norwegia.

## **THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TRAINING OF JUDICIARY**

Atas undangan dari National Judicial Institute Kanada, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. menghadiri the 10th International Conference on the Training of Judiciary yang diselenggarakan pada 30 Oktober s.d. 3 November 2022 di Ottawa Kanada.

## **PELATIHAN PROSECUTING ENVIRONMENTAL CRIMES**

Atas undangan dari International Law Enforcement Academy (ILEA) Mahkamah Agung RI menugasi Bayu Soho Rahardjo, S.H. (KPN Bengkulu) untuk berpartisipasi dalam pelatihan Prosecuting Environmental Crimes di Bangkok, Thailand pada tanggal 12-16 Desember 2022.

## **STUDI BANDING MENGENAI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR**

Atas undangan dari Departemen Kehakiman A.S., Kantor Pengembangan, Bantuan, dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri (USDOJ/OPDAT) Mahkamah Agung RI menugasi tiga orang hakim pengadilan tingkat pertama, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. (KPN Jakarta Pusat), Taufan Mandala, S.H., M.Hum. (Hakim PN Surabaya), dan Maria Christina Barus, S.I.P., S.H., M.H. (Hakim PN Stabat) untuk menghadiri kegiatan studi banding mengenai Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Washington D.C., Ashland/ Portland dan Oregon, Amerika Serikat pada tanggal 1--8 November 2022.

## **ASIA PACIFIC CONFERENCE 2022**

Atas undangan dari International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan University of Newcastle, Newcastle, New South Wales, Australia, Mahkamah Agung RI menugasi Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. untuk menghadiri Asia Pacific Conference 2022 of the International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ) Asia Pacific Chapter tanggal 23--25 November 2022 di University of Newcastle, Australia.



# Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh



## **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110  
(021) 3843348, 3810350, 3457661  
[persuratan@mahkamahagung.go.id](mailto:persuratan@mahkamahagung.go.id)